

**PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN DAN AKUNTANSI  
PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP KINERJA  
MANAJERIAL PADA DINAS SOSIAL  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**Diajukan Oleh:**

**Ning Mulyani Indirawati**

**4517013045**



**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan**

**Guna Memperoleh Gelar**

**Sarjana EKONOMI**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS BOSOWA**

**MAKASSAR**

**2021**

### HALAMAN PENGESAHAN

Judul	: Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerial Pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan
Nama Mahasiswa	: Ning Mulyani Indirawati
Nomor Stambuk	: 4517013045
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis
Program Studi	: Akuntansi
Tempat Penelitian	: Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan

Telah disetujui

**UNIVERSITAS BOSOWA**

Pembimbing I Pembimbing II

Dr. Firman Menne, S.E., M.Si., Ak. CA Indah Syamsuddin, S.E., M.Ak

Mengetahui dan Mengesahkan :

**Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa** **Ketua Program Studi Akuntansi**

Dr. A. Arifuddin Mane, S.E., M.Si., S.H., M.H Dr. Firman Menne, S.E., M.Si., Ak. CA

Tanggal Pengesahan.....

**PERNYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI**

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ning Mulyani Indirawati  
Nim : 4517013045  
Jurusan : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Judul : Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Akuntansi  
Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerial Pada Dinas  
Sosial Provinsi Sulawesi Selatan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini dibuat berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, 20 Agustus 2021

Mahasiswa yang bersangkutan



**Ning Mulyani Indirawati**

***THE EFFECT OF BUDGETARY PARTICIPATION AND RESPONSIBILITY ACCOUNTING ON MANAGERIAL PERFORMANCE AT DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN***

**By:**

**NING MULYANI INDIRAWATI**

***Accounting Department Faculty of Economics and Business  
Bosowa University***

**ABSTRACT**

NING MULYANI INDIRAWATI. 2021. *Scription. The effect of budgetary participation and responsibility accounting on managerial performance at Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan supervised by Dr. Firman Menne, S.E., M.Si., Ak, CA dan Indah Syamsuddin, S.E., M.Ak. The purpose of this research is to find out the budgetary participation and responsibility accounting on managerial performance at Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. The object of this research is Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. The type of this research is quantitative research with multiple linear regression analysis.*

*Research results shows that budgetary participation and responsibility accounting on managerial performance have a positive and significant effect on managerial performance at Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.*

***Keyword : Budgetary Participation, Responsibility Accounting, Managerial Performance.***

**PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN DAN AKUNTANSI  
PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL  
PADA DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Oleh:

**NING MULYANI INDIRAWATI**  
**Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**  
**Universitas Bosowa**

**ABSTRAK**

NING MULYANI INDIRAWATI. 2021. Skripsi. Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerial pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan dibimbing oleh Dr. Firman Menne, S.E., M.Si., Ak, CA dan Indah Syamsuddin, S.E., M.Ak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi anggaran dan akuntansi pertanggungjawaban terhadap kinerja manajerial pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. Objek penelitian ini adalah Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif menggunakan analisis regresi linear berganda.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa partisipasi anggaran dan akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.

**Kata Kunci : Partisipasi Anggaran, Akuntansi Pertanggungjawaban, Kinerja Manajerial.**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, dan teriring salam dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerial Pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan”**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak – pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan bimbingan serta nasihat dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu :

1. Pertama-pertama, saya ucapkan terima kasih penulis berikan kepada Rektor Universitas Bosowa Bapak Prof. Dr. Ir. Saleh Pallu, M.Eng.
2. Bapak Dr. H. A. Arifuddin Mane, SE., M.Si., SH., MH selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa.
3. Ibu Dr. Hj. Herminawati Abu Bakar S.E., M.M selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar
4. Bapak Dr. Firman Manne, SE. M.Si., Ak. CA selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa sekaligus sebagai dosen pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Indah Syamsuddin, SE. M.Ak selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing, mengarahkan dan memberi saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

6. Kepada seluruh Dosen Universitas Bosowa yang telah memberikan Ilmu dan Pendidikannya kepada penulis sehingga ilmu dan wawasan penulis dapat bertambah, serta seluruh staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa yang selalu membantu dalam pengurusan administrasi.
7. Kepada pihak Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian dan memberikan hal-hal yang dibutuhkan oleh penulis menyangkut penyelesaian skripsi.
8. Kepada opa penulis Muh. Jeng, kedua orang tua penulis Bapak Ruslan, Ibu Neneng Muskanto, kedua saudari penulis Nurul Fadilah dan Azizah Mutiara, serta seluruh keluarga atas perhatian, kasih sayang, dan semangat yang diberikan sehingga penulis dapat berada hingga di titik ini.
9. Teruntuk sahabat penulis Jivadevi, KOR, Fandi Putra, Nurul Annisa dan Partner, Dea Ramadhani, dan orang terdekat penulis Muh. Arief Ilham S, yang senantiasa menemani penulis dalam keadaan susah maupun senang.
10. Teruntuk teman-teman kampus yang menemani penulis di bangku perkuliahan terutama untuk Irensa Femy, Andi Nur Sakinah, dan senior penulis kak Yusuf yang senantiasa menjadi partner dalam diskusi penyusunan skripsi serta pengurusan segala berkas administrasi.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEORSINILAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
2.1 Kerangka Teori.....	7
2.1.1 Anggaran Sektor Publik .....	7
2.1.1.1 Pengertian Anggaran Sektor Publik .....	7
2.1.1.2 Jenis-Jenis Anggaran Sektor Publik.....	8
2.1.1.3 Fungsi Anggaran Sektor Publik .....	9
2.1.1.4 Prinsip-Prinsip Anggaran Sektor Publik .....	11



2.1.2 Partisipasi Anggaran .....	12
2.1.2.1 Pengertian Partisipasi Anggaran .....	12
2.1.2.2 Keunggulan Partisipasi Anggaran .....	14
2.1.2.3 Kelemahan Partisipasi Anggaran .....	15
2.1.3 Akuntansi Pertanggungjawaban.....	15
2.1.3.1 Pengertian Akuntansi Pertanggungjawaban.....	15
2.1.3.2 Manfaat Akuntansi Pertanggungjawaban.....	18
2.1.4 Kinerja Manajerial .....	19
2.1.4.1 Pengertian Kinerja Manajerial.....	19
2.1.4.2 Tujuan Kinerja Manajerial .....	21
2.1.4.3 Manfaat Kinerja Manajerial .....	21
2.2 Peneliti Terdahulu.....	22
2.3 Kerangka Pikir.....	24
2.4 Hipotesis .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	26
3.2 Populasi dan Sampel.....	26
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	27
3.3.1 Jenis Data .....	27
3.3.2 Sumber Data.....	27
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	27
3.5 Metode Analisis.....	27
3.5.1 Uji Kualitas Data.....	28

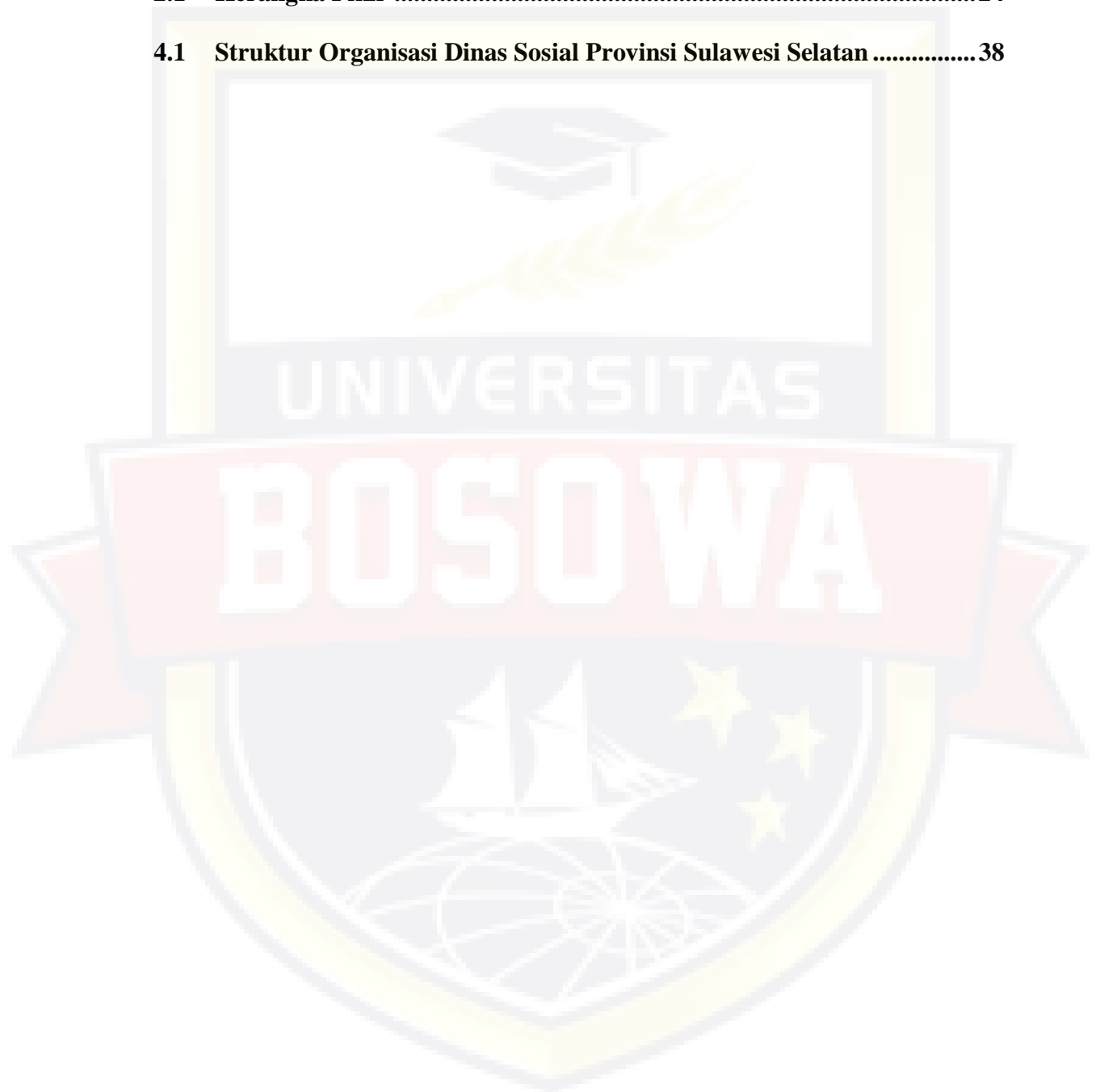
3.5.1.1 Uji Validitas .....	28
3.5.1.2 Uji Reabilitas.....	28
3.5.2 Uji Asumsi Klasik .....	28
3.5.2.1 Uji Normalitas .....	29
3.5.2.2 Uji Multikolinieritas.....	29
3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas.....	29
3.5.3 Analisis Regresi Linier Berganda .....	30
3.5.4 Uji Hipotesis.....	30
3.5.4.1 Uji t.....	30
3.5.4.2 Uji F.....	31
3.6 Definisi Operasional.....	31
3.6.1 Variabel Dependen.....	31
3.6.1.1 Kinerja Manajerial.....	31
3.6.2 Variabel Independen .....	32
3.6.2.1 Partisipasi Anggaran .....	32
3.6.2.2 Akuntansi Pertanggungjawaban.....	32
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
4.1 Gambaran Umum Instansi .....	34
4.1.1 Sejarah Singkat Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.....	34
4.1.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi.....	35
4.1.2.1 Kedudukan .....	35
4.1.2.2 Tugas dan Fungsi .....	35
4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.....	38

4.1.4 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan .....	40
4.1.4.1 Tujuan.....	40
4.1.4.2 Sasaran .....	40
4.1.4.3 Strategi .....	41
4.1.4.4 Arah Kebijakan .....	41
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	42
4.2.1 Karakteristik Responden .....	42
4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	42
4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	43
4.2.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir .....	43
4.2.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja.....	44
4.3 Analisis Deskriptif Penelitian.....	44
4.3.1 Variabel Partisipasi Anggaran.....	45
4.3.2 Variabel Akuntansi Pertanggungjawaban .....	46
4.3.3 Variabel Kinerja Manajerial.....	47
4.4 Uji Kualitas Data .....	48
4.4.1 Uji Validitas .....	48
4.4.1.1 Variabel Partisipasi Anggaran.....	49
4.4.1.2 Variabel Akuntansi Pertanggungjawaban .....	50
4.4.1.3 Variabel Kinerja Manajerial.....	51
4.4.2 Uji Reabilitas.....	52
4.5 Uji Asumsi Klasik .....	52
4.5.1 Uji Normalitas.....	52

4.5.2 Uji Multikolinieritas.....	53
4.5.3 Uji Heteroskedastisitas.....	54
4.6 Analisis Regresi Linier Berganda.....	55
4.7 Uji Hipotesis .....	56
4.7.1 Uji t.....	56
4.7.2 Uji F .....	57
4.8 Pembahasan .....	57
4.8.1 Pengaruh Variabel Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial .....	58
4.8.2 Pengaruh Variabel Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerial .....	59
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>61</b>
5.1 Kesimpulan.....	61
5.2 Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>67</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>2.1</b>	<b>Kerangka Pikir .....</b>	<b>24</b>
<b>4.1</b>	<b>Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan .....</b>	<b>38</b>



**DAFTAR TABEL**

<b>4.1</b>	<b>Tabel Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....</b>	<b>42</b>
<b>4.2</b>	<b>Tabel Karakteristik Responden Berdasarkan Usia .....</b>	<b>43</b>
<b>4.3</b>	<b>Tabel Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir ...</b>	<b>43</b>
<b>4.4</b>	<b>Tabel Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kera .....</b>	<b>44</b>
<b>4.5</b>	<b>Tabel Analisis Dekriptif Variabel Partisipasi Anggaran .....</b>	<b>45</b>
<b>4.6</b>	<b>Tabel Analisis Dekriptif Variabel Akuntansi Pertanggungjawaban....</b>	<b>46</b>
<b>4.7</b>	<b>Tabel Analisis Dekriptif Penelitian Variabel Kinerja Manajerial.....</b>	<b>47</b>
<b>4.8</b>	<b>Tabel Uji Validitas Variabel Partisipasi Anggaran.....</b>	<b>49</b>
<b>4.9</b>	<b>Tabel Uji Validitas Variabel Akuntansi Pertanggungjawaban .....</b>	<b>50</b>
<b>4.10</b>	<b>Tabel Uji Validitas Variabel Kinerja Manajerial .....</b>	<b>51</b>
<b>4.11</b>	<b>Tabel Uji Reabilitas .....</b>	<b>52</b>
<b>4.12</b>	<b>Tabel Uji Normalitas .....</b>	<b>53</b>
<b>4.13</b>	<b>Tabel Uji Multikolinieritas .....</b>	<b>54</b>
<b>4.14</b>	<b>Tabel Uji Heteroskedastisitas .....</b>	<b>55</b>
<b>4.15</b>	<b>Tabel Analisis Regresi Linier Berganda.....</b>	<b>55</b>
<b>4.16</b>	<b>Tabel Uji t.....</b>	<b>56</b>
<b>4.17</b>	<b>Tabel Uji F.....</b>	<b>57</b>

**DAFTAR LAMPIRAN**

**Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian .....67**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Bagi dunia usaha maupun lembaga yang bergerak pada pelayanan masyarakat, seperti lembaga-lembaga pemerintah, rencana keuangan selama periode yang ditentukan atau biasa disebut sebagai anggaran adalah sesuatu yang harus ditetapkan pada awal periode lembaga tersebut berjalan. Definisi dari anggaran sendiri adalah rencana keuangan tersistem yang harus ditetapkan suatu lembaga pada periode yang telah ditetapkan oleh lembaga itu sendiri. Peran penting anggaran tercermin antara lain dalam fungsi anggaran itu sendiri, yaitu alat yang memungkinkan manajemen untuk mengelola fungsi melaksanakan, merencanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan sebagai pedoman pelaksanaan bagi perusahaan agar dapat mengendalikan aktivitasnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Partisipasi anggaran dalam asifikasi anggaran adalah segala bentuk aktivitas yang ada dalam mengambil keputusan secara bersama yang terdiri dari 2 maupun lebihnya bagian dan hasil yang diambil ini akan berdampak pada organisasi di masa depan. Oleh karena itu, partisipasi yang baik berarti pimpinan dan bawahan organisasi terlibat dan tidak ada partisipasi maya. Partisipasi anggaran bertujuan untuk memungkinkan anggaran diatur sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Metode penyelenggaraan penataan anggaran diawali dengan pembuatan panitia penataan anggaran lalu dilakukan klasifikasi bersumber pada data-data



yang telah terkumpul. Setelah proses klasifikasi selesai, maka data tersebut diajukan dalam bentuk agenda kegiatan fisik serta keuangan pada tiap divisi penataan anggaran. Langkah selanjutnya adalah menyampaikan pertanggungjawaban oleh setiap pimpinan divisi pada pimpinanya untuk mempertanggungjawabkan penerapan tanggungjawab yang sudah diberikan. Penciptaan beragam bidang yang dicoba dibuat oleh manajer tertinggi selaku pusat dari segala bentuk penyerahan tanggung jawab.

Akuntansi pertanggungjawaban digunakan sebagai standar jika anggaran diukur sedemikian rupa sehingga kerja partisipatif antara manajer serta bawahan berlangsung dengan efisien atau jika ada disparitas. Akuntansi pertanggungjawaban adalah metode pengukuran untuk mengetahui operasi setiap divisi yang bertanggungjawab berhasil atau ada kesenjangan. Jika sistem ini berhasil diaplikasikan, akuntansi pertanggungjawaban akan membantu manajemen perusahaan atau organisasi membuat keputusan dan berkontribusi pada penganggaran dan evaluasi kinerja setiap pusat pertanggungjawaban untuk mencapai tujuannya secara keseluruhan.

Akuntansi pertanggungjawaban dapat biasa dipakai untuk menjadi standar dalam penilaian hasil kerja manajemen disuatu perusahaan selama waktu anggaran, hal ini bisa membantu kepala divisi atau pimpinan dengan mudah mengelola pekerjaannya, kepala bidang atau kepala seksi tidak dapat secara langsung mengelola tugas bawahannya. Tanggungjawab yang diberikan kepada kepala divisi tersebut mengharuskan mereka agar mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tanggungjawab dengan baik kepada

kepala instansi serta mampu ketika diminta pertanggungjawabannya, kepala divisi diwajibkan memahami dengan baik tanggungjawab yang diberikan untuk bawahannya.

Kinerja manajer adalah suatu bentuk hasil yang bisa didapatkan dari manajemen yang berlangsung secara efektif, dengan melakukan berbagai tahapan manajemen seperti merencanakan, melaksanakan, mengelola, melaporkan, akuntabilitas, melakukan pelatihan, dan memantau hasil kerja. Hasil kerja manajemen yang bagus dapat memberikan dampak pada kegiatan yang berlangsung di perusahaan semakin efisien. Standar dari suatu kinerja bisa dicapai jika manajemen dapat menjalankan fungsi mereka seperti merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, serta mengendalikan kegiatan yang ada di perusahaan.

Partisipasi anggaran, akuntansi pertanggungjawaban dan kinerja manajerial merupakan beberapa hal yang saling berhubungan dan saling terkait. Hal ini bisa dilihat pada setiap aktivitas yang dilakukan oleh pimpinan tim seperti ketua tim maupun manajer yang menyusun anggaran atau biasa disebut partisipasi anggaran. Dalam konteks ini, manajer harus membuat perencanaan aktivitas yang akan dilakukan oleh lembaga secara jangka panjang dan jangka pendek. Aktivitas yang direncanakan pun harus memenuhi unsur efektif dan efisiensi terhadap biaya yang dikeluarkan. Sehingga nantinya ketika akan mempertanggungjawabkannya kepada manajemen puncak, pada pimpinan tim tidak kesulitan untuk mempertanggungjawabkan hasil kinerja timnya, yang berpengaruh pada hasil penilaian di dalam kinerja manajerial.

Menurut uji coba yang dilakukan oleh Lukito (2015), hasil eksperimen yang telah dilakukan menunjukkan hasil bahwa partisipasi anggaran dan akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh secara signifikan dan positif pada variabel kinerja manajerial. Di sisi lain, menurut Kerliningtyas (2020), partisipasi anggaran berpengaruh signifikan dan positif pada variabel terhadap kinerja manajerial. Menurut penelitian lainnya oleh Aini (2018), didapatkan hasil jika partisipasi anggaran dan akuntansi pertanggungjawaban memiliki berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kinerja manajerial.

Melihat dari beberapa referensi penelitian terdahulu, peneliti memiliki motivasi untuk meneliti topik yang terkait. Referensi yang akan sering digunakan dalam penelitian ini adalah laporan penelitian yang ditulis oleh Aini (2018). Namun akan ada beberapa perbedaan diantara penelitian oleh Aini (2018) dengan laporan yang akan ditulis oleh peneliti, seperti adanya perbedaan terhadap objek penelitian dan juga rentang waktu penelitian. Hal ini dikarenakan peneliti ingin lebih mengetahui pengaruh dari partisipasi anggaran dan akuntansi pertanggungjawaban terhadap kinerja manajerial yang ada pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.

Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan merupakan pelaksana daerah di bidang kesejahteraan sosial. Partisipasi anggaran di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan memungkinkan kepala departemen atau kepala bidang untuk bertanggungjawab atas pelaksanaan anggaran yang telah disiapkan. Partisipasi anggaran dan akuntansi pertanggungjawaban adalah poin penting untuk menyusun

anggaran yang tepat sasaran, sehingga kinerja manajemen yang baik bisa tercapai oleh perusahaan. .

Menurut hasil pemaparan uraian fenomena diatas, maka peneliti memiliki ketertarikan untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerial Pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Menurut hasil penjabaran uraian fenomena diatas, maka peneliti merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan?
2. Bagaimana pengaruh akuntansi pertanggungjawaban terhadap kinerja manajerial pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Agar dapat memahami bagaimana pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Agar dapat memahami bagaimana pengaruh akuntansi pertanggungjawaban terhadap kinerja manajerial pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Menurut tujuan dari diadakannya penelitian ini, maka peneliti berharap agar laporan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang memiliki kepentingan seperti dibawah ini :

### 1. Manfaat Teoritis :

- a. Untuk Peneliti, laporan penelitian ini dibuat agar peneliti dapat menambah wawasannya terhadap dampak partisipasi anggaran dan akuntansi pertanggungjawaban dalam kinerja manajerial..
- b. Untuk Akademisi, peneliti berharap agar laporan penelitian ini bisa menjadi sumber referensi yang baik bagi mahasiswa Universitas Bosowa dalam menambah wawasannya.
- c. Untuk Institusi Pendidikan,peneliti berharap agar laporan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi terhadap keberlangsungan penelitian selanjutnya, serta memperbaiki kesalahan yang ditemukan pada penulisan laporan ini..

### 2. Manfaat Praktis :

- a. Untuk Manajer atau Kepala Bidang dan Kepala Seksi Organisasi, peneliti berharap agar laporan penelitian ini bisa dijadikan sebagai saran maupun masukan untuk mempertimbangkan pada perencanaan, pengelolaan, serta penerapan anggaran suatu lembaga di dalam akuntansi pertanggungjawaban.
- b. Untuk para praktisi, peneliti berharap agar laporan penelitian ini bisa mengetahui bagaimana partisipasi anggaran akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh pada sikap dari pemimpin tim seperti manajer atau ketua tim untuk meningkatkan hasil kinerja tim.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kerangka Teori**

##### **2.1.1 Anggaran Sektor Publik**

###### **2.1.1.1 Pengertian Anggaran Sektor Publik**

Menurut Mardiasmo (2018:76), bahwa “anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas”. Secara singkat dapat dinyatakan bahwa anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan :

1. Beberapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja); dan
2. Berapa banyak dan bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut (pendapatan).

Menurut Mahmudi (2016:59), pengertian anggaran sektor publik adalah “...*blue print* organisasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta masa depan yang akan diwujudkan”. Sedangkan menurut Putra dkk (2015), menyatakan bahwa “anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program”.

Dari beberapa pengertian mengenai anggaran sektor publik yang telah dikemukakan oleh para ahli, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa anggaran adalah tindakan yang akan dilaksanakan oleh organisasi sektor publik

menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi di masa yang akan datang.

#### **2.1.1.2 Jenis-Jenis Anggaran Sektor Publik**

Anggaran sektor publik mengalami perkembangan yang cukup pesat terutama setelah adanya gerakan reformasi sektor publik di berbagai negara. Menurut Mardiasmo (2018:82), anggaran sektor publik dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Anggaran Operasional (*Operational/Recurrent Budget*)

Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan,. Pengeluaran pemerintah yang dapat dikategorikan dalam anggaran operasional adalah “Belanja Rutin”. Belanja Rutin (*Recurrent Expenditure*) adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah. Disebut “rutin” karena sifat pengeluaran tersebut berulang-ulang ada setiap tahun. Secara umum, pengeluaran yang masuk kategori anggaran operasional antara lain Belanja Administrasi Umum dan Belanja Operasional dan Pemeliharaan.

2. Anggaran Modal/Investasi (*Capital/Investment Budget*)

Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabotan, dan sebagainya. Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan dengan menggunakan pinjaman. Belanja Investasi/Modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun

anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharannya.

### 2.1.1.3 Fungsi Anggaran Sektor Publik

Bagi organisasi sektor publik seperti pemerintah, anggaran tidak hanya sebuah rencana tahunan tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas atas pengelolaan dana publik yang dibebankan kepadanya. Halim dan Kusufi (2016:48) mengidentifikasi bahwa anggaran sektor publik memiliki beberapa fungsi utama yaitu sebagai berikut:

1. Anggaran Sebagai Alat Perencanaan

Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut.

2. Anggaran Sebagai Alat Pengendalian

Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar (*overspending*), terlalu rendah (*underspending*), salah sasaran (*missappropriation*) atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya (*misspending*).

3. Anggaran Sebagai Alat Kebijakan Fiskal

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah, digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran sektor publik dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi dan estimasi ekonomi.



#### 4. Anggaran Sebagai Alat Politik

Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu.

#### 5. Anggaran Sebagai Alat Koordinasi Dan Komunikasi

Melalui dokumen anggaran yang komprehensif, sebuah bagian atau unit kerja atau departemen yang merupakan sub-organisasi dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang akan dilakukan oleh bagian/unit kerja lainnya.

#### 6. Anggaran Sebagai Alat Penilaian Kinerja

Kinerja eksekutif dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa hasil yang dicapai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja.

#### 7. Anggaran Sebagai Alat Motivasi

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar dapat bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang ditetapkan.

#### 8. Anggaran Sebagai Alat Untuk Menciptakan Ruang Publik

Masyarakat dan elemen masyarakat lainnya nonpemerintah, seperti LSM, Perguruan Tinggi, Organisasi Keagamaan, dan organisasi masyarakat lainnya, harus terlibat dalam proses penganggaran publik.

Keterlibatan mereka dapat bersifat langsung dan tidak langsung. Keterlibatan langsung masyarakat dalam proses penganggaran dapat dilakukan mulai dari proses penyusunan perencanaan pembangunan maupun rencana kerja pemerintah (daerah), sedangkan keterlibatan secara tidak langsung dapat melalui perwakilan mereka di lembaga legislatif (DPR/DPRD).

#### **2.1.1.4 Prinsip-Prinsip Anggaran Sektor Publik**

Mengingat begitu pentingnya peranan dan fungsi anggaran, maka diperlukan prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bagi organisasi publik dalam penyusunannya. Beberapa prinsip anggaran sektor publik menurut Mardiasmo (2018:83), prinsip-prinsip anggaran sektor publik meliputi:

a. Otorisasi Oleh Legislatif

Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislative terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut.

b. Komprehensif

Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana *nonbudgeter* pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif.

c. Keuntungan Anggaran

Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum (*general fund*).

d. *Nondiscretionary Appropriation*

Jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

e. Periodik

Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan maupun multi-tahunan.

f. Akurat

Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi (*hidden reserve*) yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya *underestimate* pendapatan dan *overestimate* pengeluaran.

g. Jelas

Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat, dan tidak membingungkan.

h. Diketahui publik

Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas.

## 2.1.2 Partisipasi Anggaran

### 2.1.2.1 Pengertian Partisipasi Anggaran

Partisipasi dalam penyusunan anggaran merupakan hal yang penting karena merupakan proses dalam pengambilan keputusan bersama oleh dua atau lebih pihak, dimana keputusan tersebut akan memiliki dampak masa depan terhadap organisasi. Oleh karena itu, partisipasi anggaran yang baik adalah yang

melibatkan atasan dan bawahan didalam organisasi tidak terjadi partisipasi semu. Partisipasi anggaran adalah keterlibatan antara manajer menengah dan bawah dalam proses penyusunan anggaran dalam mengambil sebuah keputusan.

Adapun Indikator penting yang harus ada saat proses partisipasi anggaran, yaitu :

- 1) Permintaan usulan pendapat dalam proses penganggaran
- 2) Pengaruh partisipasi dalam proses penganggaran akhir
- 3) Kelogisan atasan terhadap laporan revisi anggaran
- 4) Kontribusi yang diberikan saat proses penganggaran
- 5) Permintaan pendapat oleh atasan
- 6) Inisiatif sendiri pada saat revisi dan proses penganggaran

Menurut Lina (2015), bahwa “partisipasi penyusunan erat hubungannya dengan seberapa jauh keterlibatan dan pengaruh individu dalam proses penyusunan anggaran dengan adanya partisipasi anggaran maka dapat terjadi keselarasan tujuan suatu organisasi”. Sedangkan Menurut Garrison et al. (2013:385) anggaran partisipatif adalah “anggaran yang disusun dengan partisipasi penuh dari manajer pada segala tingkatan”.

Apabila dikaitkan dengan teori keagenan, partisipasi anggaran merupakan proses kerjasama antara manajer tingkat bawah selaku ageen dan manajer tingkat atas selakuprinsipal dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penganggaran.

Definisi partisipasi dalam anggaran secara terperinci yaitu :

- a. Sejauh mana anggaran dipengaruhi oleh keterlibatan para pengurus.
- b. Alasan-alasan pihak manajer pada saat anggaran diproses.
- c. Keinginan memberikan partisipasi anggaran kepada pihak manajer tanpa diminta.
- d. Sejauhmana manajer mempunyai pengaruh dalam anggaran akhir.
- e. Kepentingan manajer dalam partisipasinya terhadap anggaran.
- f. Anggaran didiskusikan antara pihak manajer puncak dengan manajer pusat pertanggungjawaban pada saat anggaran disusun.

#### **2.1.2.2 Keunggulan Partisipasi Anggaran**

Sistem anggaran memberikan beberapa keuntungan bagi organisasi. Kelebihan dari sistem penganggaran ialah memaksa manajer untuk membuat rencana masa depan, memberikan informasi sumber daya yang dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, sebagai standar bagi evaluasi kinerja, meningkatkan komunikasi dan koordinasi. Selain itu kegiatan ini juga memotivasi manajer untuk mengembangkan arah bagi organisasi, meramalkan kesulitan, mengembangkan kebijakan masa depan dan memperbaiki pembuatan keputusan. Partisipasi anggaran dapat menghasilkan informasi yang lebih baik, karena memberi kesempatan atasan untuk mendapatkan akses informasi sebenarnya pada bawahan.

Dalam partisipasi anggaran terdapat dua keunggulan yaitu:

1. Tujuan anggaran akan dapat lebih mudah diterima apabila anggaran tersebut berada di bawah pengawasan manajer.

2. Penganggaran partisipasi menghasilkan pertukaran informasi yang efektif antara pembuat anggaran dan pelaksana anggaran yang dekat dengan produk dan pasar.

### **2.1.2.3 Kelemahan Partisipasi Anggaran**

Partisipasi anggaran juga memiliki beberapa kelemahan, adapun kelemahan partisipasi anggaran yaitu:

- 1) Terjadinya kesenjangan anggaran karena pegawai tidak memberikan seluruh informasi mengenai anggaran dengan maksud untuk membuat kelonggaran anggaran agar target perusahaan dapat tercapai.
- 2) Partipasi semu (*Pseudo participation*) yaitu pegawai yang seolah memberikan pendapat namun sebenarnya tidak (asal-asalan), hal ini biasanya disebabkan karena pegawai hanya sekedar memberikan pendapat karena diperintah oleh manajernya.

Masalah-masalah tersebut harus menjadi perhatian bagi manajemen perusahaan agar kemungkinan untuk terjadi dapat diminimalisir. Penetapan standar yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat diatasi dengan mengajak para manajer berpartisipasi dalam menentukan target anggaran yang tinggi tetapi realistis untuk dicapai. Manajer puncak harus memeriksa kembali anggaran yang diusulkan bawahannya secara seksama serta memberikan masukan.

### **2.1.3 Akuntansi Pertanggungjawaban**

#### **2.1.3.1 Pengertian Akuntansi Pertanggungjawaban**

Akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem akuntansi yang mengakui berbagai pusat tanggungjawab pada keseluruhan organisasi dan mencerminkan

rencana serta tindakan setiap pusat tanggung jawab itu dengan menetapkan penghasilan dan biaya tertentu bagi pusat yang memiliki tanggungjawab bersangkutan dimana alokasi dan pengelompokan pertanggungjawaban, kesesuaian dengan struktur organisasi serta laporan anggaran yang jelas menjadi persyaratan penting dalam pelaporan akuntansi pertanggungjawaban.

Menurut Rompas (2015), pengertian akuntansi pertanggungjawaban adalah:

Akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu sistem yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya dan/atau penghasilan dilaksanakan sesuai bidang pertanggungjawaban dalam organisasi, dengan tujuan agar orang atau kelompok bertanggungjawab atas penyimpanan biaya dan/atau penghasilan yang dianggarkan dapat diketahui dan dapat segera diperbaiki.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu sistem akuntansi yang membagi struktur organisasi menjadi bagian-bagian atau pusat-pusat pertanggungjawaban yang memiliki otoritas dan tanggung jawab yang jelas, dari setiap pusat pertanggungjawaban tersebut dikumpulkan dan dilaporkan hasil-hasil prestasi yang dicapai.

Adapun Indikator penting yang harus ada dalam akuntansi pertanggungjawaban:

1) Struktur Organisasi

- a. Kejelasan batasan wewenang dari setiap tugas yang diperoleh.
- b. Pengklasifikan karyawan berdasarkan tugasnya.

- c. Kepastian bahwa karyawan telah mengerjakan pekerjaan sesuai dengan tugasnya sendiri.
- d. Pendelegasian wewenang yang jelas.
- e. Komunikasi manajer dan karyawan saat jam kerja.
- f. Pelaporan yang jelas atas job description yang diperolehnya.

## 2) Perencanaan Dalam Penganggaran

- a. Sistem anggaran yang dibuat telah terkendali (jelas).
- b. Anggaran disusun sesuai dengan tingkatan manajemen dalam organisasi.
- c. Keikutsertaan manajer dalam penganggaran.
- d. Pelaporan yang jelas apabila terdapat penyimpangan dalam penganggaran.
- e. Tanggung jawab manajer di setiap pusat pertanggungjawaban.
- f. Pemisahan biaya antara yang terkendali ataupun tidak terkendali.

## 3) Sistem Akuntansi Dan Pelaporan

- a. Kerutinan laporan keuangan di setiap bulannya.
- b. Pengalokasian biaya telah dilakukan dengan metode yang tepat.
- c. Pencatatan biaya telah sesuai dengan prosedur yang ada.
- d. Sistem pengkodean telah dapat diidentifikasi secara tepat menurut pihak yang berkompeten.
- e. Laporan keuangan telah dievaluasi oleh pihak yang tepat (bertanggungjawab).



- f. Informasi keuangan telah dilaporkan oleh pihak yang bertanggung jawab atas tugas tersebut.
- g. Pembuatan laporan harus menggunakan metode yang sama secara berurutan.
- h. Laporan keuangan terbit tepat waktu setiap bulannya.
- i. Dalam membuat perencanaan anggaran, biaya telah direalisasikan pula sesuai dengan job disc nya.

### **2.1.3.2 Manfaat Akuntansi Pertanggungjawaban**

Menurut Hansen dan Mowen dalam Aini (2018), manfaat akuntansi pertanggungjawaban adalah:

1) Untuk Penyusunan Anggaran.

Informasi akuntansi pertanggungjawaban berperan untuk memperjelas peran seorang manajer dalam memperjelas peran manajer dalam proses penyusunan anggaran dan merinci pihak yang bertanggung jawab setiap divisi pertanggungjawaban.

2) Sebagai Penilai Kinerja Manajer Pusat Pertanggungjawaban.

Penilaian kinerja merupakan perilaku manusia dalam kemampuannya dalam menjalankan wewenang yang diberikan oleh atasan kepadanya berupa sasaran dan tujuan dalam akuntansi pertanggungjawaban yang jelas akan dapat memudahkan manajer dalam menilai kinerja seorang karyawan.

## 2.1.4 Kinerja Manajerial

### 2.1.4.1 Pengertian Kinerja Manajerial

Ada banyak definisi mengenai pengertian kinerja manajerial. Menurut Bernardin dan Russel dalam Aini (2018), bahwa “kinerja manajerial adalah pencapaian hasil (*output*) yang diukur dengan pelaporan diri sendiri (*self report*) sebagai hasil dari suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan”. Kinerja umumnya diukur dengan membandingkan antara input dan output yang dihasilkan, apakah telah sesuai dengan perencanaan yang disusun oleh manajerial. Akan tetapi, pengukuran output pada sektor publik terutama pemerintah, adalah berupa jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat. Sehingga kuantitas dan kualitasnya sulit untuk diukur.

Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerja terhadap sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi tentang efisiensi penggunaan sumberdaya dalam menghasilkan output yang berkualitas, membandingkan hasil kerja dengan rencana kerja, serta menunjukkan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur prestasi seorang manajer ditentukan dari seberapa besar manajer tersebut mampu memenuhi standar fungsi manajemen antara lain:

- 1) Perencanaan (*Planning*)

Proses komunikasi antara pegawai dan manajer dalam merencanakan serta menjadwalkan program kerja pada periode yang akan datang.

2) Investigasi (*Investigating*)

Pengumpulan berbagai data informasi guna mengukur, laporan dan catatan rekening perusahaan/organisasi.

3) Pengkoordinasian (*Coordinating*)

Keahlian manajer dalam bertukar informasi dengan manajer lain untuk mengaitkan antara program yang satu dengan program yang lainnya.

4) Evaluasi (*Evaluating*)

Bagaimana kemampuan manajer dalam menilai catatan laporan kinerja.

5) Pengawasan Supervisi (*Supervising*)

Kemampuan untuk menangani bawahan, dalam artian memberikan arahan, menetapkan wewenang, serta menjelaskan aturan dalam perusahaan tersebut.

6) Pengaturan Staffing (*Staffing*)

Kemampuan dalam memilih pegawai, menempatkan serta mempromosikan pegawai.

7) Negoisasi (*Negotiations*)

Kemampuan untuk melakukan tawar menawar dalam hal kerja sama (kontrak), jual atau beli produk.

8) Perwakilan (*Representating*)

Kemampuan untuk menjadi wakil dari perusahaan/organisasi untuk bisa bertemu dengan pihak lain.

#### **2.1.4.2 Tujuan Kinerja Manajerial**

Tuntutan terhadap kinerja manajerial yang baik adalah untuk menjaga eksistensi atau kelangsungan operasional. Adapun tujuan kinerja manajerial adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Evaluasi

Seorang manajer melakukan penilaian kinerja pegawai dari masa lalu pegawai tersebut dengan menggunakan rating deskriptif yang digunakan sebagai bentuk pertimbangan dalam pemberian promosi, demosi, terminasi dan kompensasi.

b. Tujuan Pengembangan

Manajer menggunakan penilaian kinerja berdasarkan informasi yang valid dan akurat berkenaan dengan perilaku dan kinerja anggota organisasi atau perusahaan yang digunakan sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan kinerja tersebut dimasa yang akan datang.

#### **2.1.4.3 Manfaat Kinerja Manajerial**

1. Meningkatkan prestasi kerja aparatur sipil negara.
2. Memupuk rasa kesetiaan pegawai negeri sipil terhadap negara dan pemerintah.
3. Memberikan perangsang kepada aparatur sipil negara untuk selalu memberikan performa terbaik.

## 2.2 Peneliti Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu alat pendukung dari sebuah penelitian yang memberikan informasi mengenai apa yang diteliti serta mampu mendukung teori serta konsep-konsep yang digunakan dalam sebuah penelitian. Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari kesamaan dan dijadikan sebagai perbandingan dengan penelitian ini, maka dari itu peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang mampu mendukung informasi yang digunakan.

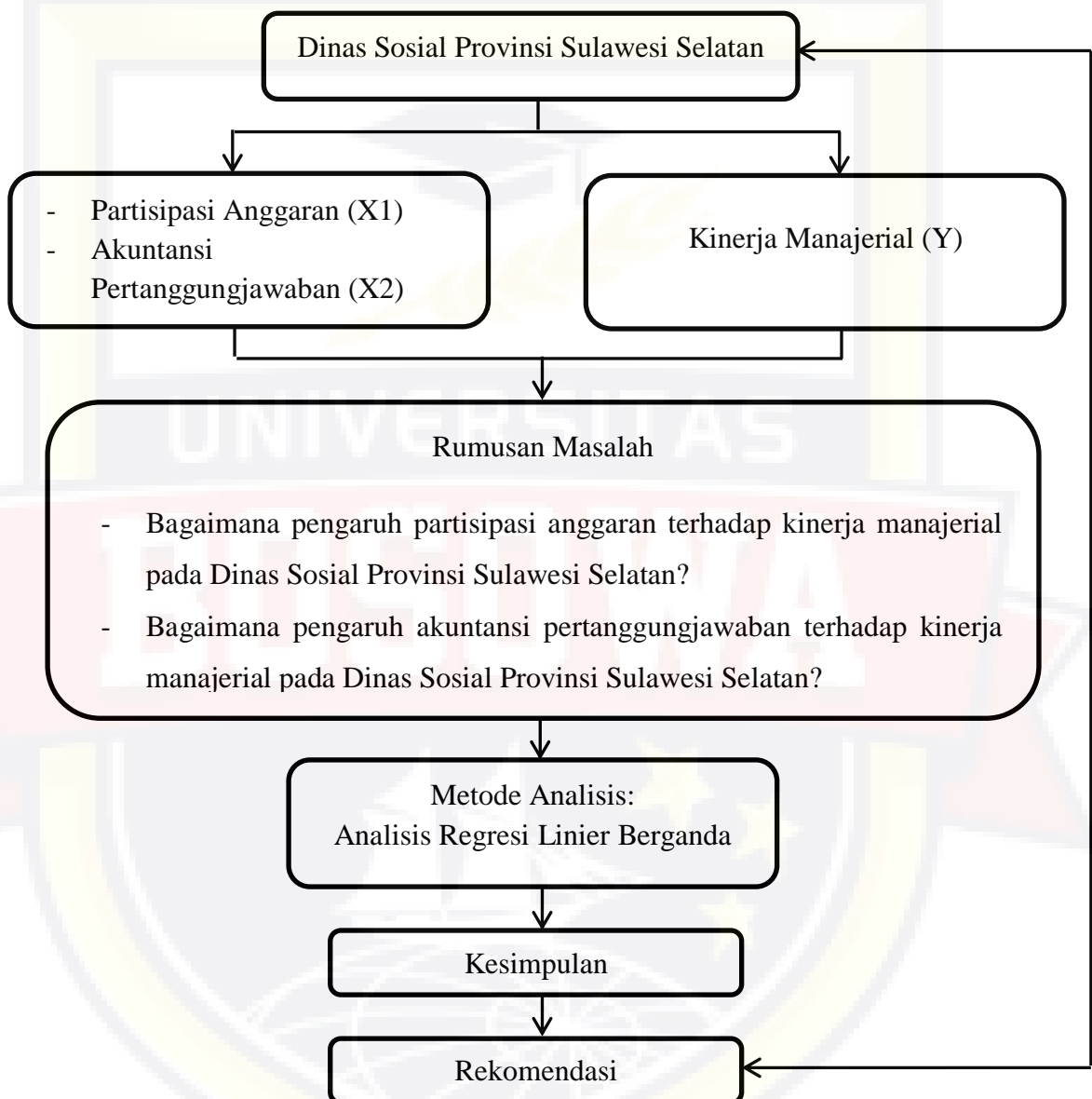
1. Penelitian yang dilakukan oleh Nurcahyani (2010) dengan judul “Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Melalui Komitmen Organisasi Dan Persepsi Inovasi Sebagai Variabel Intervening” dengan objek pejabat struktural SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemerintah Kabupaten Magelang yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. Hal ini didasarkan dari isi simpulan yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi manajer dalam proses penyusunan anggaran maka semakin baik kinerjanya.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Kerlingningtyas (2020) dengan judul “Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Pada PT. PLN (PERSERO) Makassar” dengan objek para pegawai yang bekerja di PT. PLN (Persero) UPT Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kinerja manajerial. Dalam hal ini didukung oleh ketiga indikator yakni keterlibatan manajer dalam penyusunan anggaran, keterlibatan manajer dalam pengawasan proses penyusunan anggaran, dan keterlibatan dalam penyampaian pendapat pada penyusunan anggaran. Jika ketiga indikator itu meningkat (ditambah) maka akan meningkatkan kinerja manajerial.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Aini (2018) dengan judul “Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerial” dengan objek personil Aparatur Sipil Negara pada LPHPTPH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi anggaran dan akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajerial. Hal ini didasarkan dari hasil pengujian melalui aplikasi SPSS yang telah dilakukan.

## 2.3 Kerangka Pikir

### 2.1 Bagan Kerangka Pikir



## 2.1 Hipotesis

### 1. Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial

H0 : Tidak terdapat pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Manajerial

H1 : Terdapat pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Manajerial

### 2. Pengaruh Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerial

H0 : Tidak terdapat pengaruh Akuntansi Pertanggungjawaban terhadap Kinerja Manajerial

H2 : Terdapat pengaruh Akuntansi Pertanggungjawaban terhadap Kinerja Manajerial



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada instansi pemerintahan yaitu pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan yang berlokasi di jalan A. P. Pettarani No.59, Bua Kana, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2021.

#### **3.2 Populasi dan Sampel**

Sugiyono (2018:130), mengartikan “populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Berdasarkan pengertian populasi tersebut, maka yang akan dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh manajer atau kepala bidang pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.

Sugiyono (2018:131), bahwa “sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Teknik dalam pengambilan sampel pada penelitian ini adalah dengan sampling jenuh, menurut sugiyono (2018:85), berpendapat “sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampling jenuh biasa juga disebut sensus, sampel pada penelitian ini adalah seluruh manajer atau kepala bidang pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 41 orang.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

#### **3.3.1 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif, data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini kemudian diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan statistik atau matematika. Data kuantitatif bersifat nyata sehingga peneliti harus saksama untuk mendapatkan data yang akurat.

#### **3.3.2 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diberikan langsung dan diperoleh dengan metode kuesioner yang dibagikan kepada para manajer struktural Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan data sekunder adalah data tidak langsung yang diperoleh melalui data angka dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan atau dokumen-dokumen pendukung lainnya.

#### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode kuesioner yang berisi daftar pertanyaan dan dibagikan kepada sampel penelitian. Setiap jawaban dari pertanyaan akan diberikan skor sesuai dengan masing-masing skala pengukuran. Pembagian kuesioner dilakukan di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.

#### **3.5 Metode Analisis**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linier berganda dengan mengolah data menggunakan program SPSS 20. Berikut adalah pengujian-pengujian yang dilakukan dari hasil penelitian ini:

### **3.5.1 Uji Kualitas Data**

#### **3.5.1.1 Uji Validitas**

Instrumen penelitian yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data tersebut valid. Validitas adalah pengukuran yang menunjukkan tingkat ketepatan (kesahihan) ukuran suatu instrumen terhadap konsep yang diteliti. Suatu instrumen adalah tepat untuk digunakan sebagai ukuran suatu konsep jika memiliki tingkat validitas yang tinggi. Sebaliknya, validitas rendah mencerminkan bahwa instrumen kurang tepat untuk diterapkan. Menurut Ghozali (2013) yaitu “Apabila korelasi antar skor masing masing butir pertanyaan dengan total skor tiap konstruknya signifikan pada level 0,01 dan 0,05, maka pertanyaan tersebut dikatakan valid”.

#### **3.5.1.2 Uji Reabilitas**

Uji reabilitas adalah uji yang digunakan untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstuk. Sebuah kuesioner dikatakan reliable atau stabil dari waktu ke waktu. Tingkat reliable suatu variabel atau konstruk penelitian dikatakan berhasil apabila uji statistis Cronbanch Alpha > 0,60. Apabila nilai alphanya semakin mendekati nilai satu, maka nilai reliabilitasnya semakin terpercaya.

### **3.5.2 Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik digunakan untuk melihat apakah di dalam model regresi tersebut terdapat suatu penyimpangan, sehingga perlu diadakan pemeriksaan dengan menggunakan pengujian normalitas, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas.

### 3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah nilai residual di dalam model regresi berganda terdistribusi normal atau tidak. Cara nya dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal yang berkaitan, yaitu normal P-Plot, jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya, model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Uji normalitas bisa juga menggunakan analisis statistik, yaitu dengan menggunakan uji Kolmogorov–Smimov (K-S), apabila tingkat signifikansi pada Asymp Sig (2-tailed) lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan data berdistribusi normal.

### 3.5.2.2 Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas timbul akibat adanya kausal antara dua variabel bebas atau lebih atau adanya kenyataan bahwa dua variabel penjelas atau lebih bersama-sama dipengaruhi oleh variabel ketiga yang berada diluar model, untuk mendeteksi adanya multikolinieritas, Nugroho menyatakan jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) tidak lebih dari 10 maka model terbebas dari uji multikolinieritas.

### 3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah di dalam model regresi terdapat perbedaan varians antara residual yang satu dan yang lainnya. Model regresi dapat dikatakan memenuhi persyaratan apabila terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut heteroskedastisitas. Dengan cara melakukan uji spearman rho, yaitu jika

probabilitas masing-masing variabel independen  $> 0,05$  maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas didalam model regresi.

### 3.5.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Sugiyono (2016), bahwa “analisis regresi linier berganda merupakan regresi yang memiliki satu variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen”.

$$Y = \alpha + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

Keterangan: Y = Kinerja manajerial.

$\alpha$  = Konstan atau koefisien

$b_1$  = Koefisien regresi partisipasi anggaran

$b_2$  = Koefisien akuntansi pertanggungjawaban

$X_1$  = Partisipasi anggaran

$X_2$  = Akuntansi pertanggungjawaban

$e$  = Tingkat eror

### 3.5.4 Uji Hipotesis

#### 3.5.4.1 Uji t

Ghozali (2013:34) menyatakan bahwa “Uji statistik t dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen, jika nilai probability lebih kecil dari 0,05 maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen”.

### 3.5.4.2 Uji F

F hitung dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama dapat berpengaruh terhadap variabel dependen dengan dasar pengambilan keputusan.

Dasar pengambilan keputusan dengan menggunakan angka probabilitas signifikansi, yaitu:

1. Apabila probabilitas signifikansi  $> 0.05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak
2. Apabila probabilitas signifikansi  $< 0.05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

## 3.6 Definisi Operasional

Adapun definisi operasional dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

### 3.6.1 Variabel Dependen

#### 3.6.1.1 Kinerja Manajerial

Menurut Widya (2017), bahwa “kinerja manajerial merupakan prestasi yang diperoleh manajer dalam mencapai tujuan organisasi”. Sedangkan menurut Julyalahi (2017), yaitu “kinerja manajerial adalah pencapaian organisasi yang didasarkan atas visi misi sebuah organisasi”.

Variabel kinerja manajerial diukur dengan menggunakan instrumen “self-rating” yang dikembangkan oleh Mahoney dkk (1963) dalam Simanjuntak (2018) dan berjumlah 9 item pernyataan. Instrumen diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin, dimana skor 1 (sangat tidak setuju) menunjukkan kinerja manajerial

yang rendah, skor 2 (tidak setuju), skor 3 (ragu-ragu), skor 4 (setuju), dan skor 5 (sangat setuju) menunjukkan kinerja manajerial yang tinggi.

Kinerja manajerial dalam penelitian ini diukur dengan delapan dimensi kinerja yaitu: perencanaan, investigasi, pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, pengaturan staf, negosiasi, dan perwakilan/representasi.

### **3.6.2 Variabel Independen**

#### **3.6.2.1 Partisipasi Anggaran**

Menurut Ilmawan (2017), bahwa “partisipasi anggaran merupakan keterlibatan semua tingkatan manajemen dalam menyusun anggaran”. Instrumen pertanyaan pada variabel partisipasi anggaran antara lain mengenai: seberapa besar keterlibatan para manajer dalam proses penyusunan anggaran, tingkat kelogisan alasan atasan untuk merevisi usulan anggaran yang dibuat manajer, intensitas manajer mengajak diskusi tentang anggaran, besarnya pengaruh manajer dalam anggaran, seberapa besar manajer merasa mempunyai kontribusi penting terhadap anggaran, serta frekuensi atasan meminta pendapat manajer dalam penyusunan anggaran. Instrumen diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin, dimana skor 1 (sangat tidak setuju) menunjukkan partisipasi rendah, skor 2 (tidak setuju), skor 3 (ragu-ragu), skor 4 (setuju) dan skor 5 (sangat setuju) menunjukkan partisipasi yang tinggi.

#### **3.6.2.2 Akuntansi Pertanggungjawaban**

Menurut Rudianto dalam Eliza (2016) bahwa:

Akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem akuntansi yang mengakui berbagai pusat tanggungjawab pada keseluruhan organisasi dan mencerminkan rencana serta tindakan setiap pusat tanggung jawab itu

dengan menetapkan penghasilan dan biaya tertentu bagi pusat yang memiliki tanggungjawab bersangkutan dimana alokasi dan pengelompokan pertanggungjawaban, kesesuaian dengan struktur organisasi serta laporan anggaran yang jelas menjadi persyaratan penting dalam pelaporan akuntansi pertanggungjawaban.

Indikator yang digunakan dalam mengukur akuntansi pertanggungjawaban berjumlah 6 item pertanyaan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan anggaran, serta sistem akuntansi dan pelaporan. Instrumen diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin, dimana skor 1 (sangat tidak setuju) menunjukkan partisipasi rendah, skor 2 (tidak setuju), skor 3 (ragu-ragu), skor 4 (setuju) dan skor 5 (sangat setuju).



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Instansi**

##### **4.1.1 Sejarah Singkat Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan**

Salah satu unsur yang melaksanakan program pemerintah daerah di Sulawesi Selatan adalah Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan yang menangani berbagai masalah terkait kesejahteraan sosial. Dinas ini dibentuk melalui Kepres No. 388 Tahun 1995, tertanggal 6 Desember 1995, yang menyatakan jika Dinas Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan adalah lembaga yang berjalan secara vertikal, atau lembaga yang tergabung dari 2 lembaga dinas lain seperti Dinas Kesejahteraan Sosial dan Dinas Perlindungan Masyarakat yang kesehariannya akan melakukan tugas sesuai fungsinya secara mandiri. Namun pada tahun 1999, Kantor Wilayah memberikan inisiasinya untuk membentuk suatu lembaga yang berada pada naungan Presiden secara langsung, sehingga kemudian dibentuk Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSNN), dengan otonomi daerah yang berlangsung tahun 2001, kemudian PP 41 Tahun 2008 Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Sosial agar diganti dengan nama Dinas Sosial, sehingga pada peraturan terbaru UU 23 Pasal 18 Tahun 2004 mengatur tentang struktural pemerintah yang melakukan pemekaran.

## **4.1.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

### **4.1.2.1 Kedudukan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 8 Tahun 2008, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan adalah elemen pemerintah yang memiliki fungsi untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan memiliki pimpinan seorang Kepala Dinas yang akan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada Gubernur dengan melalui perantara Sekretaris Daerah.

### **4.1.2.2 Tugas dan Fungsi**

Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan memiliki pekerjaan rumah untuk mengurangi jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tersebar di 24 Kabupaten/Kota.

Agar bisa melaksanakan pekerjaan diatas, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan diberikan fungsi seperti dibawah ini:

- a. Penyusunan Kebijakan Teknis di bidang Sosial, meliputi Bidang Sektor Pemberdayaan Sosial, Sektor Jaminan Sosial dan Perlindungan Sosial, Sektor Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial serta Sektor Informasi dan Sumber Daya Sosial.
- b. Menyelenggarakan kegiatan sosial dan layanan di Sektor sosial dengan ruang lingkup Sektor Pemberdayaan Sosial, Sektor Bantuan dan Jaminan Sosial, Sektor Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial serta Sektor Informasi dan Sumber Daya Sosial.
- c. Membina dan menyelenggarakan pekerjaan yang ada di bidang sosial dengan ruang lingkup Bidang Pemberdayaan Sosial Sektor Bantuan dan

Jaminan Sosial, Sektor Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dan Sektor Informasi dan Sumber Daya Sosial.

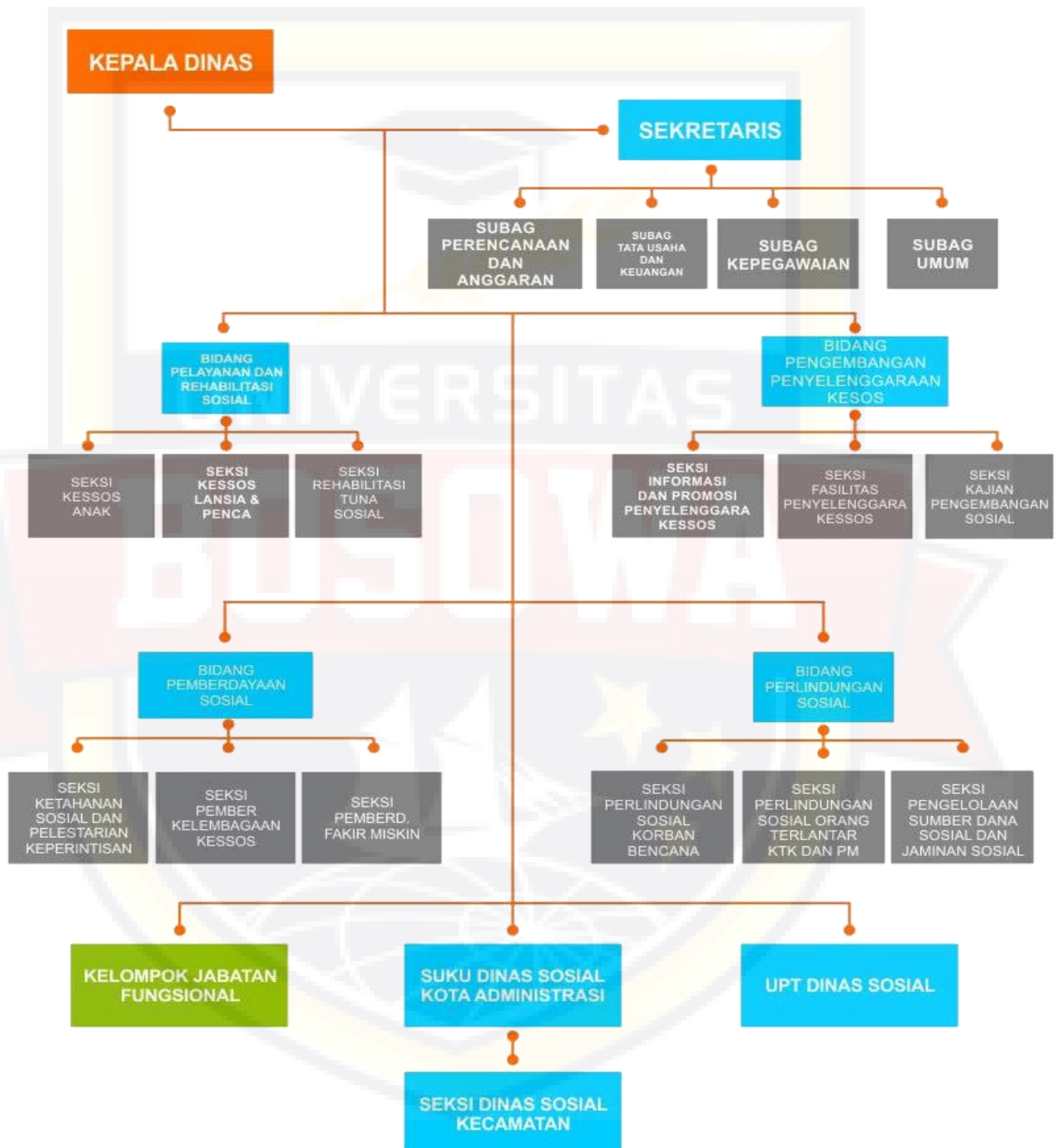
- d. Menyelenggarakan pekerjaan dinas lain yang mencakup tugas dibidangnya.  
Kepala Dinas juga memiliki dukungan dari beberapa elemen organisasi untuk melaksanakan pekerjaan diatas seperti :
- a. Sekretariat dengan memiliki pimpinan Sekretaris, yang memiliki pekerjaan inti dalam pengkoordinasian aktivitas, pemberian layanan yang bersifat teknis, serta melakukan perencanaan pada urusan publik dan kepegawaian dalam lingkup administrasi, meninjau perencanaan keuangan, dan menyusun program yang akan diimplementasikan oleh Dinas Sosial.
  - b. Sektor Pemberdayaan Sosial yang memiliki pimpinan seorang Kabid (Kepala Bidang) yang bertugas untuk membantu Kepala Dinas untuk hal pengkoordinasian, perumusan, serta pelaksanaan implementasi dari kebijakan teknis tentang perlindungan dan jaminan sosial dimasyarakat.
  - c. Sektor Perlindungan Dan Jaminan Sosial yang memiliki pimpinan seorang Kabid (Kepala Bidang) yang bertugas untuk membantu Kepala Dinas untuk hal pengkoordinasian, perumusan, serta pelaksanaan implementasi dari kebijakan teknis tentang perlindungan dan jaminan sosial dimasyarakat.
  - d. Sektor Rehabilitasi Sosial yang memiliki pimpinan seorang Kabid (Kepala Bidang) yang bertugas untuk membantu Kepala Dinas untuk hal pengkoordinasian, perumusan, serta pelaksanaan implementasi dari kebijakan teknis tentang rehabilitasi sosial dimasyarakat.

- e. Sektor Penangan Fakir Miskin yang memiliki pimpinan seorang Kabid (Kepala Bidang) yang bertugas untuk membantu Kepala Dinas untuk hal pengkoordinasian, perumusan, serta pelaksanaan implementasi dari kebijakan teknis penangan fakir miskin.



### 4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan



Sumber: Kepegawaian Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan (2019)

Struktur organisasi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
  - a. Sub Bagian Program
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan Hukum
  - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
  - a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
  - b. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial;
  - c. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
4. Bidang Rehabilitasi Sosial
  - a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak;
  - b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia;
  - c. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Perdagangan Orang, dan Rehabilitasi Sosial Lainnya.
5. Bidang Pemberdayaan Sosial
  - a. Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, Kelembagaan Masyarakat dan Penyelenggaraan Sumber Dana Sosial;
  - b. Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil;
  - c. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.

6. Bidang Penindakan Fakir Miskin
  - a. Seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan;
  - b. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan;
  - c. Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Daerah Tertinggal dan Pulau-Pulau Kecil.
7. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)
  - a. PSBR Makkareso Maros
  - b. PSBR Nirannuang Bulukumba
  - c. PSTPA Inang Matutu Makassar
  - d. PSTW Mattirodeceng Makassar
  - e. PSAA Seroja Bone
  - f. PPSLU Mappakasunggu Pare-Pare
8. Kelompok Jabatan Fungsional

#### **4.1.4 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan**

##### **4.1.4.1 Tujuan**

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan
2. Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah

##### **4.1.4.2 Sasaran**

1. Peningkatan Pelayanan dan Pemenuhan kebutuhan dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
2. Peningkatan potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) melalui kelembagaan

3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah

#### **4.1.4.3 Strategi**

1. Menstabilkan pemenuhan kualitas hidup dan akses seluas-luasnya bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam layanan sosial yang bersifat, adanya akses pada fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, serta kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat.
2. Peran aktif dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, masyarakat, maupun lingkungan bisnis yang memberikan dukungan untuk menyelenggarakan layanan kesejahteraan sosial secara menyeluruh dimasyarakat, serta membentuk jejaring kerjasama pelakuusaha kesejahteraan sosial termasuk Organisasi Sosial (ORSOS) tingkat lokal.

#### **4.1.4.4 Arah Kebijakan**

1. Meningkatkan kualitas hidup terutama Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pada layanan sosial yang bersifat dasar, adanya akses terhadap fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, serta adanya jaminan terhadap kesejahteraan sosial masyarakat secara menyeluruh.
2. Peningkatan terhadap keaktifan dan peran serta bagi masyarakat yang berkecukupan, lingkungan bisnis, perguruan tinggi dan ORSOS/LSM untuk membangun kesejahteraan sosial masyarakat



yang sesuai dengan arah kebijakan yang *sustain* dalam mendayagunakan sumber dari kesejahteraan sosial bagi masyarakat secara menyeluruh.

3. Meningkatkan kualitas pelayanan serta bantuan yang bersifat dasar untuk memenuhi kesejahteraan sosial masyarakat terutama bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta peningkatan pemberdayaan kelompok rentan sosial lainnya.

## 4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 4.2.1 Karakteristik Responden

Peneliti menetapkan objek pada penelitian ini yaitu semua manajer maupun kepada bidang di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan berjumlah 41 orang dengan menyebar kuisioner yang diambil menggunakan teknik sampling jenuh.

### 4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

**Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Laki-laki	25	61,0	61,0	61,0
Valid Perempuan	16	39,0	39,0	100,0
Total	41	100,0	100,0	

Sumber: Data Primer, diolah dengan SPSS Versi 20 (2021)

Tabel 4.1 menjelaskan jika responden laki-laki lebih dominan sebanyak 25 orang (61,0%) yang jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan responden perempuan yaitu sebanyak 16 orang (39,0%). Berarti bisa dikatakan jika manajer atau kepala bidang yang berada di kantor memiliki jenis kelamin laki-laki, karena

dianggap memiliki tubuh serta energi yang lebih besar untuk melaksanakan tugas layanan publik, terutama tugas di lapangan.

#### 4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

**Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid < 50 tahun	12	29,3	29,3	29,3
Valid 50-55 tahun	19	46,3	46,3	75,6
Valid > 55 tahun	10	24,4	24,4	100,0
Total	41	100,0	100,0	

Sumber: Data Primer, diolah dengan SPSS Versi 20 (2021)

Tabel 4.2 memperlihatkan jika responden yang berusia kisaran 50-55 tahun lebih dominan yaitu sebanyak 19 orang (46,3%), kemudian usia dibawah 50 tahun memiliki jumlah 12 orang (29,3%), sedangkan usia diatas 55 tahun yaitu memiliki jumlah 10 orang (24,4%). Berarti bisa dikatakan jika manajer atau kepala bidang Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan sebagian besar adalah orang-orang yang kompeten di bidangnya.

#### 4.2.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

**Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid SMA/SMK	1	2,4	2,4	2,4
Valid D4	1	2,4	2,4	4,9
Valid S1	19	46,3	46,3	51,2
Valid S2	20	48,8	48,8	100,0
Total	41	100,0	100,0	

Sumber: Data Primer, diolah dengan SPSS Versi 20 (2021)

Tabel 4.3 memperlihatkan jika tingkat pendidikan manajer atau kepala bidang S2 lebih dominan yaitu sebanyak 20 orang (48,8%), kemudian tingkat pendidikan S1 memiliki jumlah 19 orang (46,3%), tingkat pendidikan D4 1 orang (2,4%), dan tingkat pendidikan SMA/SMK 1 orang (2,4%). Berarti bisa dikatakan jika manajer atau kepala bidang pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan sebagian besar pendidikan terakhirnya adalah tingkat pendidikan S2.

#### 4.2.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

**Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 5-10 tahun	1	2,4	2,4	2,4
> 10 tahun	40	97,6	97,6	100,0
Total	41	100,0	100,0	

Sumber: Data Primer, diolah dengan SPSS Versi 20 (2021)

Tabel 4.4 memperlihatkan jika responden manajer atau kepala bidang dengan masa kerja diatas 10 tahun lebih dominan yaitu sebanyak 40 orang (97,6%), sedangkan manajer atau kepala bidang dengan masa kerja 5-10 tahun yaitu 1 orang (2,4%). Hal ini menunjukkan bahwa manajer atau kepala bidang pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang baik tentang pekerjaannya.

#### 4.3 Analisis Deskriptif Penelitian

Menurut hasil dari mengumpulkan data dengan menyebar kuisioner pada 41 responden, hasil dari jawaban responden tersebut dijabarkan pada tabel dibawah

ini untuk melihat kecenderungan responden dalam menjawab beberapa pernyataan maupun pertanyaan yang ada di dalam kuisisioner.

#### 4.3.1 Variabel Partisipasi Anggaran

**Tabel 4.5 Variabel Partisipasi Anggaran**

No.	Pertanyaan	Nilai Jawaban					Mean	Std. Dev
		1	2	3	4	5		
1	Saya berpartisipasi dalam penyusunan anggaran di wilayah pertanggungjawaban saya.	0	2	5	23	11	4,04	0,76
			5%	12%	56%	27%		
2	Saya berpartisipasi dalam pengawasan proses penyusunan anggaran.	0	4	4	24	9	3,92	0,85
			10%	10%	59%	22%		
3	Saya sering mengutarakan pendapat dan saran tentang anggaran kepada atasan saya tanpa diminta	0	3	6	25	7	3,87	0,72
			7%	15%	61%	17%		
4	Usulan gagasan saya berpengaruh terhadap penyusunan anggaran akhir.	0	5	11	22	3	3,56	0,81
			12%	27%	54%	7%		
5	Saya mempunyai partisipasi terhadap proses penyusunan anggaran akhir	0	1	13	25	2	3,68	0,61
			2%	32%	61%	5%		
6	Atasan meminta masukan saya saat proses penyusunan anggaran	0	0	14	23	4	3,75	0,62
				34%	56%	10%		
	<b>Rata-rata</b>						<b>3,80</b>	<b>0,73</b>

Sumber: Hasil Hitung Penyebaran Kuesioner

Berdasarkan tabel 4.5 partisipasi anggaran pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa responden lebih dominan memberikan tanggapan setuju (skor 4) pada keenam pertanyaan variabel partisipasi anggaran yaitu sebesar 57,8 % dan tanggapan sangat setuju (skor 5) sebesar 14,6% (total 72,4%. Hal ini menunjukkan bahwa responden memiliki rasa tanggung jawab dalam pekerjaannya.

### 4.3.2 Variabel Akuntansi Pertanggungjawaban

**Tabel 4.6 Variabel Akuntansi Pertanggungjawaban**

No.	Pertanyaan	Skor Jawaban					Mean	Std. Dev
		1	2	3	4	5		
1	Apakah struktur organisasi anda secara jelas membatasi kewenangan setiap manajer atau kepala bidang	0	0	0	28	13	4,31	0,47
					68%	32%		
2	Apakah anda mengetahui kewajiban dan wewenang yang diberikan kepada anda	0	0	0	26	15	4,36	0,49
					63%	37%		
3	Apakah terdapat uraian tugas yang jelas antara struktur dan pelaporan pertanggungjawaban	0	0	0	30	11	4,26	0,45
					73%	27%		
4	Apakah menurut anda penganggaran adalah alat yang dapat mengkoordinasikan semua sumber daya untuk mencapai suatu tujuan	0	3	4	28	6	3,90	0,74
			7%	10%	68%	15%		
5	Apakah data keuangan dilaporkan manajer atau kepala bidang yang bertanggungjawab terhadap data tersebut	0	2	4	31	4	3,90	0,57
			5%	10%	76%	10%		
6	Apakah anda telah menyediakan dan mengumpulkan data analisis pekerjaan dalam laporan kegiatan	0	0	1	33	7	4,14	0,42
				2%	80%	17%		
	<b>Rata-rata</b>						<b>4,15</b>	<b>0,52</b>

Sumber: Hasil Hitung Penyebaran Kuesioner

Berdasarkan tabel 4.6 akuntansi pertanggungjawaban pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa responden lebih dominan memberikan tanggapan setuju (skor 4) pada keenam pertanyaan variabel partisipasi anggaran yaitu sebesar 71,3 % dan tanggapan sangat setuju (skor 5) sebesar 23% (total 94,3%). Keadaan tersebut membuktikan responden memiliki

partisipasi efisien saat penganggaran akhir serta kejelasan tanggungjawab yang diberikan kepada manajer atau kepala bidang.

### 4.3.3 Variabel Kinerja Manajerial

**Tabel 4.7 Variabel Kinerja Manajerial**

No.	Pertanyaan	Skor Jawaban					Mean	Std. Dev
		1	2	3	4	5		
1	<b>Perencanaan</b> Saya aktif dalam menentukan tujuan, kebijakan agenda kegiatan seperti penjadwalan kerja, penyusunan anggaran, dan penyusunan program.	0	1	4	24	12	4,14	0,69
			2%	10%	59%	29%		
2	<b>Investigasi</b> Saya aktif dalam pengumpulan dan penyiapan informasi yang berbentuk catatan dan laporan.	0	0	3	25	13	4,24	0,58
				7%	61%	32%		
3	<b>Pengkoordinasian</b> Saya aktif dalam tukar menukar informasi dalam organisasi untuk mengkoordinasikan dan menyamakan laporan.	0	1	1	30	9	4,14	0,57
			2%	2%	73%	22%		
4	<b>Evaluasi</b> Saya aktif dalam mengevaluasi dan menilai agenda kerja, laporan kinerja maupun kerja yang dipantau pada unit/sub unit saya.	0	0	1	27	13	4,29	0,51
				2%	66%	32%		
5	<b>Pengawasan</b> Saya aktif dalam mengarahkan, memimpin dan mengembangkan para bawahan yang ada pada unit/sub unit saya.	0	0	0	26	15	4,36	0,49
					63%	37%		
6	<b>Pengaturan Staf</b> Saya aktif dalam mengelola/mengatur pegawai pada unit/sub unit saya.	0	0	0	30	11	4,26	0,45
					73%	27%		
7	<b>Negosiasi</b> Saya melakukan perjanjian untuk barang atau jasa yang diperlukan pada unit/sub unit saya dengan pihak luar.	0	11	15	14	1	3,12	0,84
			27%	37%	34%	2%		
8	<b>Perwakilan</b> Saya aktif dalam menggantikan instansi tempat saya bekerja saat melakukan kegiatan dengan pihak lain diluar instansi	0	3	15	20	3	3,56	0,74
			7%	37%	49%	7%		
	<b>Rata-rata</b>						<b>4,01</b>	<b>0,60</b>

Sumber: Hasil Hitung Penyebaran Kuesioner

Berdasarkan tabel 4.7 kinerja manajerial pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa responden lebih dominan memberikan tanggapan setuju (skor 4) pada keenam pertanyaan variabel partisipasi anggaran yaitu sebesar 59,8 % dan tanggapan sangat setuju (skor 5) sebesar 23,5% (total

83,3%). Keadaan tersebut membuktikan responden mempunyai rasa tanggung jawab yang baik dalam menjalankan pekerjaannya.

#### **4.4 Uji Kualitas Data**

##### **4.4.1 Uji Validitas**

Menurut Siregar (2010), suatu jawaban dari responden bisa dinyatakan valid jika adanya pernyataan tentang pengungkapan suatu fenomena yang bisa terukur dengan kuisisioner yang disebar. Dari tabel hasil pengujian validitas variabel X1, X2, dan Y disimpulkan bahwa r tabel dengan df  $(n-2)$  atau  $(41-2) = 39$  serta tahap signifikan 0,05 dengan memakai uji 2 arah yaitu 0,3081 sehingga dapat dinyatakan valid. Berikut merupakan tabel pengolahan data uji validitas menggunakan aplikasi SPSS 20.

#### 4.4.1.1 Variabel Partisipasi Anggaran

**Tabel 4.8 Variabel Partisipasi Anggaran**

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	Partisipasi Anggaran
X1.1	Pearson Correlation	1	.781**	.461**	.467**	0.288	.542**	.793**
	Sig. (2-tailed)		0	0.002	0.002	0.068	0	0
	N	41	41	41	41	41	41	41
X1.2	Pearson Correlation	.781**	1	.359*	.426**	0.244	.438**	.748**
	Sig. (2-tailed)	0		0.021	0.005	0.124	0.004	0
	N	41	41	41	41	41	41	41
X1.3	Pearson Correlation	.461**	.359*	1	.545**	.515**	.404**	.723**
	Sig. (2-tailed)	0.002	0.021		0	0.001	0.009	0
	N	41	41	41	41	41	41	41
X1.4	Pearson Correlation	.467**	.426**	.545**	1	.776**	.477**	.812**
	Sig. (2-tailed)	0.002	0.005	0		0	0.002	0
	N	41	41	41	41	41	41	41
X1.5	Pearson Correlation	0.288	0.244	.515**	.776**	1	.515**	.711**
	Sig. (2-tailed)	0.068	0.124	0.001	0		0.001	0
	N	41	41	41	41	41	41	41
X1.6	Pearson Correlation	.542**	.438**	.404**	.477**	.515**	1	.725**
	Sig. (2-tailed)	0	0.004	0.009	0.002	0.001		0
	N	41	41	41	41	41	41	41
Partisipasi Anggaran	Pearson Correlation	.793**	.748**	.723**	.812**	.711**	.725**	1
	Sig. (2-tailed)	0	0	0	0	0	0	
	N	41	41	41	41	41	41	41

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber: Hasil diolah dengan SPSS Versi 20 (2021)



#### 4.4.1.2 Variabel Akuntansi Pertanggungjawaban

**Tabel 4.9 Variabel Akuntansi Pertanggungjawaban**

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	Akuntansi Pertanggung jawaban
X2.1	Pearson Correlation	1	.788*	.652*	.019	.123	.138	.742**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.904	.445	.389	.000
	N	41	41	41	41	41	41	41
X2.2	Pearson Correlation	.788*	1	.683*	.172	.033	.219	.774**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.283	.838	.168	.000
	N	41	41	41	41	41	41	41
X2.3	Pearson Correlation	.652*	.683*	1	.157	.124	.052	.717**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.326	.439	.749	.000
	N	41	41	41	41	41	41	41
X2.4	Pearson Correlation	.019	.172	.157	1	-.185	-.195	.380*
	Sig. (2-tailed)	.904	.283	.326		.247	.223	.014
	N	41	41	41	41	41	41	41
X2.5	Pearson Correlation	.123	.033	.124	-.185	1	.431*	.442**
	Sig. (2-tailed)	.445	.838	.439	.247		.005	.004
	N	41	41	41	41	41	41	41
X2.6	Pearson Correlation	.138	.219	.052	-.195	.431*	1	.431**
	Sig. (2-tailed)	.389	.168	.749	.223	.005		.005
	N	41	41	41	41	41	41	41
Akuntansi Pertanggung Jawaban	Pearson Correlation	.742*	.774*	.717*	.380*	.442*	.431*	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.014	.004	.005	
	N	41	41	41	41	41	41	41

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber: Hasil diolah dengan SPSS Versi 20 (2021)

#### 4.4.1.3 Variabel Kinerja Manajerial

**Tabel 4.10 Variabel Kinerja Manajerial**

		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Kinerja Manajerial
Y.1	Pearson Correlation	1	.530**	.513**	.653**	.430**	.273	.183	.079	.771**
	Sig. (2-tailed)		.000	.001	.000	.005	.084	.252	.621	.000
	N	41	41	41	41	41	41	41	41	41
Y.2	Pearson Correlation	.530**	1	.640**	.677**	.382*	.413**	-.011	-.093	.702**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.014	.007	.945	.563	.000
	N	41	41	41	41	41	41	41	41	41
Y.3	Pearson Correlation	.513**	.640**	1	.788**	.430**	.233	-.193	-.021	.655**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000		.000	.005	.143	.226	.894	.000
	N	41	41	41	41	41	41	41	41	41
Y.4	Pearson Correlation	.653**	.677**	.788**	1	.662**	.303	-.027	.083	.831**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.054	.868	.605	.000
	N	41	41	41	41	41	41	41	41	41
Y.5	Pearson Correlation	.430**	.382*	.430**	.662**	1	.569**	-.172	.109	.653**
	Sig. (2-tailed)	.005	.014	.005	.000		.000	.282	.496	.000
	N	41	41	41	41	41	41	41	41	41
Y.6	Pearson Correlation	.273	.413**	.233	.303	.569**	1	-.221	-.013	.381*
	Sig. (2-tailed)	.084	.007	.143	.054	.000		.165	.937	.014
	N	41	41	41	41	41	41	41	41	41
Y.7	Pearson Correlation	.183	-.011	-.193	-.027	-.172	-.221	1	.327*	.279
	Sig. (2-tailed)	.252	.945	.226	.868	.282	.165		.037	.077
	N	41	41	41	41	41	41	41	41	41
Y.8	Pearson Correlation	.079	-.093	-.021	.083	.109	-.013	.327*	1	.365*
	Sig. (2-tailed)	.621	.563	.894	.605	.496	.937	.037		.019
	N	41	41	41	41	41	41	41	41	41
Kinerja Manajerial	Pearson Correlation	.771**	.702**	.655**	.831**	.653**	.381*	.279	.365*	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.014	.077	.019	
	N	41	41	41	41	41	41	41	41	41

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber: Hasil diolah dengan SPSS Versi 20 (2021)

#### 4.4.2 Uji Reabilitas

Ghozali (2015) menyatakan jika item dari pernyataan maupun pertanyaan yang ada di kuisioner bisa dinilai reliable jika hasil dari data responden tersebut memiliki konsistensi jawaban pada beberapa uji waktu dan memiliki nilai *alpha cronbach* sebesar  $> 0,6$ ". Pada tabel hasil uji reabilitas variabel X1, X2 serta Y dapat disimpulkan bahwa untuk setiap pernyataan  $> 0,6$ , sehingga dapat dinyatakan reliabel. Berikut tabel yang diperoleh dari hasil uji reabilitas menggunakan aplikasi SPSS 20.

**Tabel 4.11 Uji Reabilitas**

No.	Variabel	Nilai Cronbach Alpha	Taraf Cronbach Alpha	Keterangan
1	Partisipasi Anggaran (X1)	0,845	0,6	Dinyatakan RELIABEL karena nilai cronbach alpha $> 0,6$
2	Akuntansi Pertanggungjawaban (X2)	0,725		
3	Kinerja Manajerial (Y)	0,692		

Sumber: Hasil diolah dengan SPSS Versi 20 (2021)

#### 4.5 Uji Asumsi Klasik

##### 4.5.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2015) menyatakan jika suatu data bisa dikatakan normal jika memiliki *residual value* yang berdistribusi secara normal, dengan nilai signifikansi sebesar  $> 0,05$ , serta hasil dari nilai signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov  $< 0,05$  bisa dikatakan sebagai data yang tidak terdistribusi dengan normal. Menurut tabel hasil uji normalitas dapat diketahui bahwa jika residu yang tidak dinormalisasi yaitu 0,200 lebih tinggi dari 0,05 berarti data terdistribusi dengan normal. Berikut tabel yang diperoleh dari hasil uji normalitas memanfaatkan aplikasi SPSS 20.

**Tabel 4.12 Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Unstandardized Residual
N			41
Normal Parameters a,b	Mean		0E-7
	Std. Deviation		2.30102714
Most Extreme Differences	Absolute		0.098
	Positive		0.098
	Negative		-0.075
Test Statistic			0.098
<b>Asymp. Sig. (2-tailed)c</b>			<b>.200d</b>
Monte Carlo Sig. (2-tailed)e	Sig.		0.402
	99% Confidence Interval	Lower Bound	0.389
		Upper Bound	0.415

a Test distribution is Normal.

b Calculated from data.

c Lilliefors Significance Correction.

d This is a lower bound of the true significance.

e Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Sumber: Hasil diolah dengan SPSS 20 (2021)

#### 4.5.2 Uji Multikolinieritas

Santoso dan Ashari (2005), mengemukakan bahwa “uji ini dapat di katakan baik jika apabila korelasi antar variabel independen tidak terjadi. Uji ini melihat pada nilai *tolerance* dan VIF (*Variance Inflation Factor*) yang didasarkan pada pernyataan jika nilai VIF < 10, bisa dikatakan multikolinieritas tidak terjadi diantara variabel independe, dan jika nilai dari VIF ternyata > 10, maka bisa dikatakan bahwa penelitian tersebut telah terjadi gejala multikolinieritas. Apabila nilai dari *tolerance* >0,10, bisa dikatakan tidak ada gejala multikoliniertias pada penelitian tersebut, dan apabila nilai *tolerance* < 0,10, bisa dikatakan bahwa penelitian tersebut telah terjadi gejala multikoliniertias. Berdasarkan tabel hasil uji

multikolinieritas didapat jika nilai VIF < 10 dan nilai Tolerance > 0,1 sehingga data data pada penelitian ini tidak ada gejala multikolinieritas. Dibawah ini adalah tabel yang didapatkan dari hasil pengujian multikolinieritas melalui aplikasi SPSS 20.

**Tabel 4.13 Uji Multikolinieritas**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1.	Partisipasi Anggaran	.893	1.120
	Akuntansi Pertanggungjawaban	.893	1.120

a. Dependent Variable: Kinerja Manajerial

Sumber: Hasil diolah dengan SPSS Versi 20 (2021)

#### 4.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Apabila nilai signifikan > 0,05 bisa disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Dari tabel hasil pengujian heteroskedastisitas dapat diketahui bahwa nilai Sig lebih > 0,05 sehingga dinyatakan gejala heteroskedastisitas tidak terjadi. Dibawah ini merupakan tabel yang didapatkan dari hasil pengujian heteroskedastisitas melalui aplikasi SPSS 20.

**Tabel 4.14 Uji Heteroskedastisitas**

			Partisipasi Anggaran	Akuntansi Pertanggungjawaban	Unstandardized Residual
Spearman's rho	Partisipasi Anggaran	Correlation Coefficient	1.000	.254	.027
		Sig. (2-tailed)		.109	.865
		N	41	41	41
	Akuntansi Pertanggungjawaban	Correlation Coefficient	.254	1.000	.036
		Sig. (2-tailed)	.109		.824
		N	41	41	41
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	.027	.036	1.000
		Sig. (2-tailed)	.865	.824	
		N	41	41	41

Sumber: Hasil diolah dengan SPSS Versi 20 (2021)

#### 4.6 Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Giovany (2017) analisa dari regresi linier berganda memiliki tujuan agar peneliti bisa melihat bagaimana 2 atau lebih variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat, serta bentuk hubungannya yang positif maupun negative, serta untuk memberikan prediksi dari nilai variabel terikat jika variabel bebas nilainya naik atau turun.

**Tabel 4.15 Analisis Regresi Linier Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	9,783	5,313		1,841	,073
Partisipasi Anggaran	,275	,120	,318	2,290	,028
Akuntansi Pertanggungjawaban	,639	,221	,402	2,895	,006

a. Dependent Variable: Kinerja Manajerial

Sumber: Hasil diolah dengan SPSS 20 (2021)

Berdasarkan tabel 4.15 diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Y = 9,783 + 0,275 X_1 + 0,639 X_2 + e$$

## 4.7 Uji Hipotesis

### 4.7.1 Uji t

**Tabel 4.16 Uji t**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	9,783	5,313		1,841	,073
Partisipasi Anggaran	,275	,120	,318	2,290	,028
Akuntansi Pertanggungjawaban	,639	,221	,402	2,895	,006

a. Dependent Variable: Kinerja Manajerial

Sumber: Hasil diolah dengan SPSS Versi 20 (2021)

Berdasarkan tabel 4.16 diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$t \text{ tabel} = t (\alpha/2 ; n-k-1) = t (0,025 ; 38) = 2,024$$

berdasarkan hasil uji hipotesis diatas, bisa diketahui jika variabel partisipasi anggaran dan akuntansi pertanggungjawaban memiliki pengaruh yang positif dan secara signifikan berpengaruh pada kinerja manajerial Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.

## 4.7.2 Uji F

**Tabel 4.17 Uji F**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	112.113	2	56.057	10.058	.000 <sup>b</sup>
	Residual	211.789	38	5.573		
	Total	323.902	40			

a. Dependent Variable: Kinerja Manajerial

b. Predictors: (Constant), Akuntansi Pertanggungjawaban

Sumber: Hasil diolah dengan SPSS Versi 20 (2021)

Tabel 4.17 menunjukkan persamaan yang diperoleh pada pengujian kali ini adalah:

$$F_{\text{tabel}} = F(k; n-k) = F(2; 38) = 3,24$$

Sehingga persamaan tersebut memperlihatkan jika Variabel X berpengaruh secara simultan pada Variabel Y.

### Hasil Uji Hipotesis

H1 : Partisipasi anggaran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan

H2 : Akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan

## 4.8 Pembahasan

Menurut hasil dari proses uji statistik diatas, hasil dari uji variabel bebas terhadap variabel terikat memperlihatkan jika variabel bebas berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap variabel terikat. Adapun hasil dari pengolahan data tersebut sama dengan hipotesis yang diajukan oleh peneliti. Uraian mengenai



pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dijabarkan pada poin-poin di bawah ini:

#### **4.8.1 Pengaruh Variabel Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial**

Hasil pengolahan data H1 memperlihatkan jika hipotesis partisipasi anggaran memiliki pengaruh pada kinerja manajerial Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. Variabel partisipasi anggaran yang diuji melalui aplikasi SPSS menunjukkan nilai  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel yakni  $2,290 > 2,024$  atau signifikansi  $\alpha$   $0,028 < 0,05$  sehingga bisa disimpulkan jika variabel partisipasi anggaran memiliki pengaruh yang signifikan dan positif pada variabel kinerja manajerial Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, dengan demikian H1 diterima.

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas, data dari penelitian ini bisa dinyatakan reliabel karena nilai *cronbach alpha* telah melebihi batas minimum yaitu  $0,845 > 0,60$  sehingga dapat dikatakan reliabel. Hasil pengujian pada tabel analisis regresi linier berganda memperlihatkan nilai koefisien variabel partisipasi anggaran (X1) sebesar 0,275 atau 27,5%. Dalam hal ini indikator yang paling dominan dalam partisipasi anggaran adalah pimpinan tim seperti manajer maupun kepala bidang yang terlibat secara langsung dalam menyusun anggaran dinas.

Hasil pengolahan data yang dilakukan pada penelitian ini memiliki bentuk data yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Kerliningtyas (2020) menemukan jika partisipasi anggaran memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kinerja manajerial didukung oleh ketiga indikator yakni manajer yang secara langsung terlibat untuk menyusun anggaran, manajer yang terlibat

secara langsung untuk mengawasi dalam menyusun anggaran, serta manajer yang secara langsung terlibat untuk menyampaikan pendapat selama proses menyusun anggaran. Jika ketiga indikator itu meningkat (ditambah) maka akan meningkatkan kinerja manajerial.

#### **4.8.2 Pengaruh Variabel Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerial**

Hasil pengolahan data pada H2 memperlihatkan jika hipotesis akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh terhadap kinerja manajerial Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. Variabel akuntansi pertanggungjawaban yang diuji melalui aplikasi SPSS menunjukkan nilai  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel yakni  $2,895 > 2,024$  atau signifikansi  $\alpha$   $0,006 < 0,05$  sehingga bisa dinyatakan jika variabel akuntansi pertanggungjawaban memiliki pengaruh yang signifikan dan positif pada variabel kinerja manajerial Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, dengan demikian H2 diterima.

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas, data pada penelitian ini dikatakan reliabel karena nilai *cronbach alpha* telah melebihi batas minimum yaitu  $0,725 > 0,60$  sehingga dapat dikatakan reliabel. Hasil pengujian pada tabel analisis regresi linier berganda juga memperlihatkan nilai dari koefisiensi variabel akuntansi pertanggungjawaban ( $X_2$ ) sebesar  $0,639$  atau  $63,9\%$ . Dalam hal ini indikator yang paling dominan dalam akuntansi pertanggungjawaban adalah pemahaman manajer atau kepala bidang mengenai tugas dan kewenangan yang telah diberikan kepada manajer atau kepala bidang.

Meskipun partisipasi anggaran dan akuntansi pertanggungjawaban memiliki pengaruh positif dan signifikan pada variabel terikat, pada hasil pengujian analisis regresi linier berganda memperlihatkan nilai jika akuntansi pertanggungjawaban 63,9% lebih dominan dalam peningkatan kinerja manajerial Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. Sehingga 36,1% sisanya menyatakan jika variabel lain yang tidak dibahas pada penelitian ini akan mempengaruhi variabel terikat.

Adapun hasil dari pengolahan data pada penelitian ini memiliki bentuk data yang sama dengan penelitian Aini (2015) menemukan jika Akuntansi Pertanggungjawaban (X2) memiliki pengaruh yang secara signifikan pada kinerja manajerial (Y) pada Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan di Pasuruan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Menurut hasil pengolahan data dengan analisis regresi linier berganda serta kajian dari berbagai literatur yang telah peneliti lakukan, maka peneliti menyimpulkan beberapa hal dari proses tersebut:

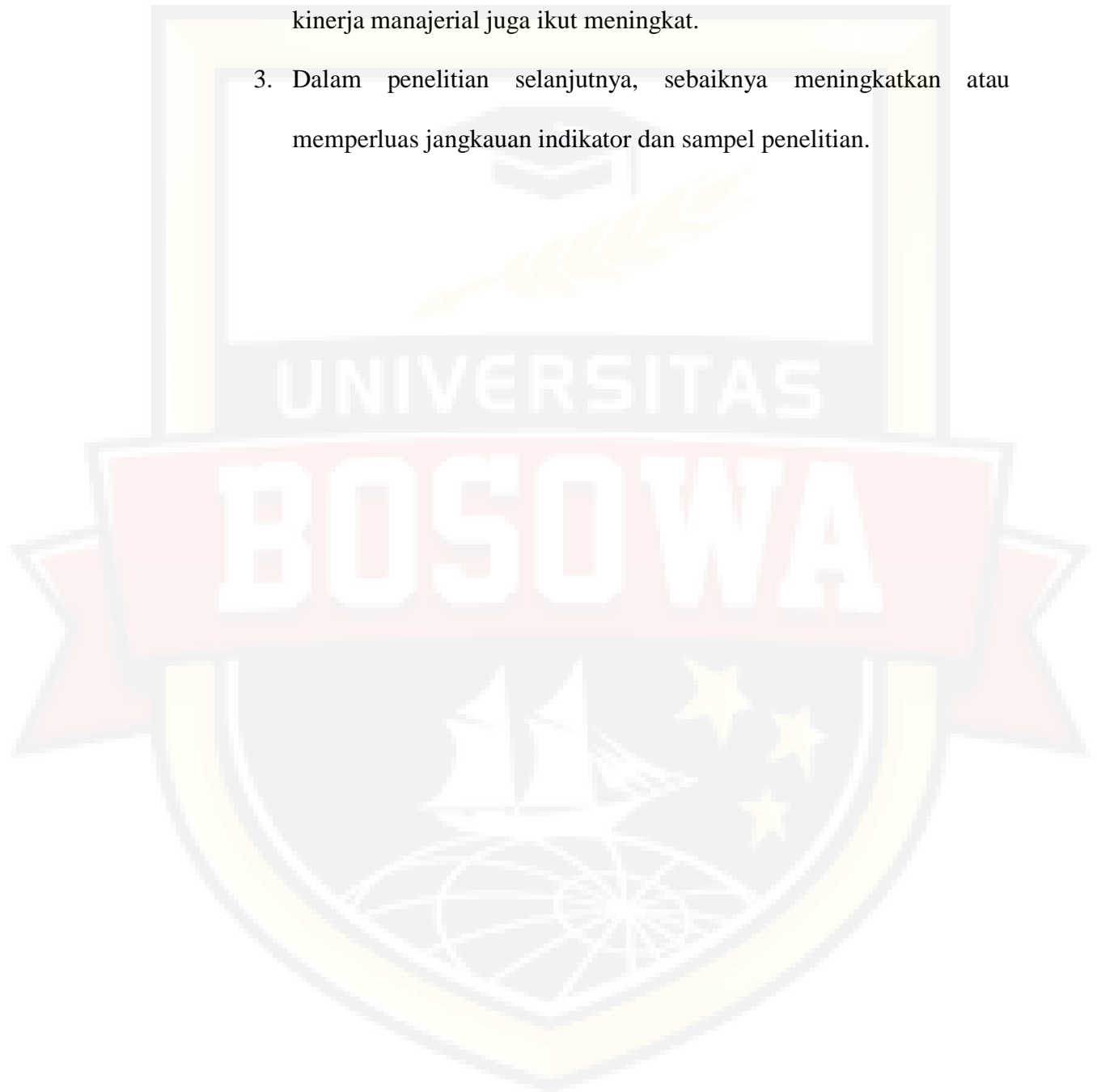
1. Variabel partisipasi anggaran memiliki pengaruh yang signifikan dan positif pada variabel kinerja manajerial. Jika keterlibatan manajer atau kepala bidang dalam menyusun anggaran nilainya meningkat, maka bisa dipastikan jika nilai dari kinerja manajerial akan meningkat sejumlah angka tersebut.
2. Variabel akuntansi pertanggungjawaban memiliki pengaruh yang signifikan dan positif pada kinerja manajerial jika pemahaman manajer atau kepala bidang tentang pekerjaan maupun tanggungjawab yang didapatkannya nilainya meningkat, maka nilai dari kinerja manajerial juga otomatis meningkat sejumlah angka tersebut.

#### **5.2 Saran**

Menurut beberapa poin kesimpulan diatas, peneliti memberikan beberapa saran guna mempertahankan kinerja manajerial yang positif seperti:

1. Tetap mempertahankan tingkat keterlibatan manajer atau kepala bidang dalam menyusun anggaran, sehingga kinerja manajerial yang ada di dalam lembaga bisa meningkat pula.

2. Tetap mempertahankan tingkat pemahaman manajer atau kepala bidang mengenai tugas dan kewenangan yang diberikan sehingga kinerja manajerial juga ikut meningkat.
3. Dalam penelitian selanjutnya, sebaiknya meningkatkan atau memperluas jangkauan indikator dan sampel penelitian.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arista, Tiwi Maitri dan Efrizal Syofyan. 2019. **Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap *Budgetary Slack* Dengan Psychological Capital Sebagai Variabel Pemoderasi**. Jurnal Eksplorasi Akuntansi. Vol. 1, No. 2, Seri B.
- Aini, Eliza Farah. 2018. **Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerial Pada Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Di Pasuruan**. Skripsi. FEB Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Bragg, Steven M. 2014. **Penganggaran (*Budgeting*)**. Jakarta: Indeks.
- Beby, Natalya. 2016. **Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Pegawai Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Balikpapan**. Jurnal Ekonomi dan keuangan Volume 13, No. 2.
- Chasanah, Fitria Uswatun. 2018. **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Budgetary Slack Dengan *Locus Of Control* Sebagai Variabel Moderating Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magetan**. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Ferdiani, Destaria. 2012. **Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Pegawai Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah: Komitmen Organisasi Dan Persepsi Inovasi Sebagai Variabel Intervening**. Skripsi. FEB Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ginting, Mitha Christina. 2018. **Partisipasi Anggaran Dan Kinerja Manajerial Organisasi**. Jurnal Manajemen. Vol. 4, No. 1.
- Ghozali, Imam. 2013. **Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS**. Edisi 7, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ghozali, Imam. 2012. **Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS**. Cetakan Kelima. Semarang: BP Universitas Diponegoro.
- Garrison, Ray H., Eric W. Noreen, dan Peter C. Brewer, 2013, **Akuntansi Manajerial Edisi 14**. Penerjemah Kartika Dewi, Salemba Empat, Jakarta.
- Ghozali, Imam. 2005. **Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS**. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 160-165.
- Ghozali, Imam. 2011. **Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS19**. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Giovany, Et Al. 2017. **Ragam Model Penelitian Dan Pengelolahannya Dengan SPSS**. Yogyakarta: Andi, 72-77.

- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2016. **Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik**. Jakarta: Salemba Empat.
- Ilmawan, Rizki. 2017. **Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Melalui Job Relevant Information, Kepuasan Kerja, Motivasi dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas)**. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang.
- Julyalahi, Elwisa. 2017. **Pengaruh Partisipasi Anggaran, Motivasi Kerja, Lingkungan Kerja, Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Manajerial Pada SKPD Kabupaten Bintan**. Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Kusniawati, Heny dan Ibnu Abni Lahaya. 2017. **Pengaruh Partisipasi Anggaran, Penekanan Anggaran, Asimetri Informasi terhadap Budgetary Slack pada SKPD Kota Samarinda**. Jurnal AKUNTABEL FEB Universitas Mulawarman Volume 14, No. 2.
- Kerliningtyas, Eugenia. 2020. **Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Pada PT PLN (PERSERO) Makassar**. Skripsi. FEB, Akuntansi, Universitas Bosowa, Makassar.
- Kepegawaian Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. 2019. **Profil Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan**.
- Lina. 2015. **Partisipasi Penyusunan Anggaran, Psychological Capital dan Kinerja Manajerial**. Fakultas Ekonomi Universitas Pelita Harapan. Journal Manajemen teknologi. Vol.14, No.14.
- Lukito, Mega Satrio dan Endang Dwi Retnani. 2015. **Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerial**. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol.4 No.12.
- Mowen Dan Hansen. 2010. *Management Accounting*. Buku 2 Edisi Ke 7. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2018. **Akuntansi Sektor Publik**. Buku Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi.
- Mahmudi. 2015. **Akuntansi Sektor Publik**. Yogyakarta: UII Press.
- Nanik, Ermawati. 2017. **Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Motivasi Kerja Sebagai Variabel Pemoderasi**. Jurnal Akuntansi Indonesia. Vol. 6, No. 2.
- Nurchayani, Kunwawiyah. 2010. **Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Melalui Komitmen Organisasi Dan Persepsi**

**Inovasi Sebagai Variabel Intervening.** Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.

Purwati, Ari. 2013. **Akuntansi Manajemen.** Jakarta: Mitra Wacana.

Putra, I Nyoman T, I Made Pradana Adiputra dan Nyoman Trisna Herawati. 2015. **Analisis Pengaruh Partisipasi Anggaran, Informasi Asimetri dan Penekanan Anggaran terhadap Senjangan Anggaran (*Budgetary Slack*).** E- Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1. Volume 3 No.1.

Rachmatika, Irma Eka. 2018. **Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Dinas (*Survey Pada Dinas Pemerintahan Kota Bandung*).** Skripsi. FEB Unpas.

Rompas, L. Herlini 2015. **Penerapan Informasi Akuntansi Pertanggungjawaban.** Vol.3, No.3, hlm: 879.

Rumengan, Widya Ingrid Adelin. 2017. **Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Dan Motivasi Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Kasus Pada PT.Telkom Witel Makassar).** Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.

Sugiyono. 2016. **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.** Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2018. **Metode Penelitian Kuantitatif.** Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2018. **Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D.** Bandung: Alfabeta.

Simanjuntak, Yuditha Andini. 2018. **Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerial Pada PT. Pelabuhan Indonesia I (PERSERO) Cabang Belawan.** Skripsi. FEB, Akuntansi, Universitas Medan Area, Medan.

Siregar, Sofyan. 2010. **Statistik Deskriptif Untuk Penelitian.** Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Santoso dan ashari. 2005. **Analisis Statistik Dengan Microsoft Excel dan SPSS.** Yogyakarta: Andi Press, 238.

Wulan, Novi. 2010. **Anggaran Publik.** Semarang: Indeks.





**LAMPIRAN**



**BOSOWA**

## KUESIONER PENELITIAN

Kepada Yth.

Bapak/Ibu

Di Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ning Mulyani Indirawati

NIM : 4517013045

Jurusan : Akuntansi

Peneliti adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bosowa yang sedang menyusun skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, dengan judul “Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerial Pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan”. Oleh karena itu, mohon bantuan Bapak/Ibu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kuesioner berikut.

Jawaban dari Bapak/Ibu atas setiap pertanyaan hanya dipergunakan untuk kepentingan akademis semata, yang sifatnya rahasia, terbatas dan tidak untuk dipublikasikan. Peran serta sumbang saran dari Bapak/Ibu sekalian sangat berarti dalam penyusunan penelitian ini. Atas perhatian dan partisipasi Bapak/Ibu, peneliti mengucapkan terima kasih.

Makassar, 28 Maret 2021

Peneliti

Ning Mulyani Indirawati

### **A. Profil Responden**

Mohon Bapak/Ibu mengisi daftar pertanyaan berikut:

1. Jenis kelamin :
2. Umur :
3. Jabatan pekerjaan :
4. Pendidikan terakhir :
5. Masa kerja :

### **B. Petunjuk Pengisian Kuesioner**

1. Sebelum mengisi kuesioner ini mohon Bapak/Ibu membaca setiap pertanyaan dengan cermat.
2. Bapak/ibu tinggal memberi tanda (√) pada kolom yang sesuai dengan pilihan.
3. Untuk setiap pertanyaan hanya diperbolehkan satu alternatif jawaban.
4. Jika ada kesalahan dalam memilih alternatif jawaban, beri tanda (√) pada kolom sesuai.
5. Semua pertanyaan yang ada, mohon di jawab tanpa ada satupun yang terlewatkan.

Keterangan:

1. STS : Sangat Tidak Setuju
2. TS : Tidak Setuju
3. N : Netral
4. S : Setuju
5. SS : Sangat Setuju

## DAFTAR PERTANYAAN

### 1. Partisipasi Anggaran (X1)

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya berpartisipasi dalam penyusunan anggaran di wilayah pertanggungjawaban					
2	Saya berpartisipasi dalam pengawasan proses penyusunan anggaran.					
3	Saya sering mengutarakan pendapat dan saran tentang anggaran kepada atasan saya tanpa diminta					
4	Usulan gagasan saya berpengaruh terhadap penyusunan anggaran akhir.					
5	Saya mempunyai partisipasi terhadap proses penyusunan anggaran akhir					
6	Atasan meminta masukan saya saat proses penyusunan anggaran					

2. Akuntansi Pertanggungjawaban (X2)

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Apakah struktur organisasi anda secara jelas membatasi kewenangan setiap manajer atau kepala bidang					
2	Apakah anda mengetahui kewajiban dan wewenang yang diberikan kepada anda					
3	Apakah terdapat uraian tugas yang jelas antara struktur dan pelaporan pertanggungjawaban					
4	Apakah menurut anda penganggaran adalah alat yang dapat mengkoordinasikan semua sumber daya untuk mencapai suatu tujuan					
5	Apakah data keuangan dilaporkan manajer atau kepala bidang yang bertanggungjawab terhadap data tersebut					
6	Apakah anda telah menyediakan dan mengumpulkan data analisis pekerjaan dalam laporan kegiatan					

### 3. Kinerja Manajerial (Y)

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	<b>Perencanaan</b> Saya aktif dalam menentukan tujuan, kebijakan agenda kegiatan seperti penjadwalan kerja, penyusunan anggaran, dan penyusunan program.					
2	<b>Investigasi</b> Saya aktif dalam pengumpulan dan penyiapan informasi yang berbentuk catatan dan laporan.					
3	<b>Pengkoordinasian</b> Saya aktif dalam tukar menukar informasi dalam organisasi untuk mengkoordinasikan dan menyamakan laporan.					
4	<b>Evaluasi</b> Saya aktif dalam mengevaluasi dan menilai agenda kerja, laporan kinerja maupun kerja yang diamati pada unit/sub unit saya.					
5	<b>Pengawasan</b> Saya aktif dalam mengarahkan, memimpin dan mengembangkan para bawahan yang ada pada unit/sub unit saya.					
6	<b>Pengaturan Staf</b> Saya aktif dalam mengelola/mengatur pegawai pada unit/sub unit saya.					
7	<b>Negosiasi</b> Saya melakukan perjanjian untuk barang atau jasa yang diperlukan pada unit/sub unit saya dengan pihak luar.					
8	<b>Perwakilan</b> Saya aktif dalam menggantikan instansi tempat saya bekerja saat melakukan kegiatan dengan pihak diluar instansi.					